



## WALIKOTA JAMBI

### KATA PENGANTAR

Penyusunan LKPj Tahun Anggaran 2017 ini dilakukan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. LKPj Tahun 2017 merupakan laporan keterangan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2017 sebagai bagian yang harus dipertanggungjawabkan untuk menegaskan komitmen terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Hasil dan capaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tahun 2017 yang dijelaskan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini, sesungguhnya merupakan hasil kerja bersama antara eksekutif dan legislatif, tentunya kami sangat menyadari bahwa, masih terdapat kekurangan yang harus kita benahi bersama, agar penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Jambi kedepan akan menjadi lebih baik.

Semoga apa yang telah kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho Allah *Subhanahuwataala*.

Terima kasih.

**Pjs. WALIKOTA JAMBI**

**IR. MUHAMMAD FAUZI**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
1.1. Dasar Hukum .....	1
1.2. Gambaran Umum Daerah .....	3
1.2.1. Kondisi Geografis Daerah.....	3
1.2.2. Gambaran Umum Demografi.....	4
1.2.3. Kondisi Ekonomi.....	6
1.3. Potensi Unggulan Daerah.....	9
<b>BAB II       KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH</b>	
2.1. Visi dan Misi .....	10
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah .....	11
2.2.1. Strategi Pembangunan Daerah .....	11
2.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.....	12
2.3. Prioritas Pembangunan Daerah .....	13
2.3.1. Percepatan Peningkatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur.....	13
2.3.2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia .....	14
2.3.3. Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi dan Investasi.....	14
2.3.4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik .....	15
2.3.5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan .....	16
2.3.6. Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial.....	16
<b>BAB III      KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	
3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	20
3.1.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah.....	21
3.1.2. Target dan Realisasi Pendapatan .....	21
3.1.3. Permasalahan dan Solusi .....	27
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	28
3.2.1. Kebijakan Umum Belanja Daerah .....	28
3.2.2. Target dan Realisasi .....	29
3.2.3. Permasalahan dan Solusi .....	31
3.2.4. Rencana dan Realisasi Pembiayaan .....	32
<b>BAB IV      PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	
4.1. <b>Urusan Wajib</b> .....	34
4.1.1. Urusan Pendidikan .....	34

4.1.2.	Usuran Kesehatan .....	39
4.1.3.	Usuran Pekerjaan Umum & Penataan Ruang .....	41
4.1.4.	Usuran Perum Rakyat & Kaw Pemukiman .....	42
4.1.5.	Usuran Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat .....	44
4.1.6.	Usuran Sosial .....	45
4.1.7.	Usuran Tenaga Kerja .....	46
4.1.8.	Usuran Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	47
4.1.9.	Usuran Pangan .....	48
4.1.10.	Usuran Lingkungan Hidup .....	49
4.1.11.	Usuran Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	51
4.1.12.	Usuran Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	53
4.1.13.	Usuran Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	54
4.1.14.	Usuran Perhubungan .....	55
4.1.15.	Usuran Komunikasi dan Informatika .....	55
4.1.16.	Usuran Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .....	56
4.1.17.	Usuran Penanaman Modal .....	57
4.1.18.	Usuran Pemuda dan Olahraga .....	59
4.1.19.	Usuran Kebudayaan .....	60
4.1.20.	Usuran Perpustakaan .....	61
4.1.21.	Usuran Kearsipan .....	62
<b>4.2.</b>	<b>Usuran Pilihan .....</b>	<b>63</b>
4.2.1.	Usuran Pariwisata .....	63
4.2.2.	Usuran Pertanian .....	64
4.2.3.	Usuran Perdagangan .....	65
4.2.4.	Usuran Kehutanan .....	67
4.2.5.	Usuran Perindustrian .....	68
<b>4.3.</b>	<b>Usuran Penunjang .....</b>	<b>68</b>
4.3.1.	Inspektorat .....	68
4.3.2.	Perencanaan .....	69
4.3.3.	Keuangan .....	70
4.3.4.	Kepegawaian serta Pendidikan dan Latihan .....	73
<b>4.4.</b>	<b>Usuran Pendukung .....</b>	<b>74</b>
4.4.1.	Sekretariat Daerah .....	74
4.4.2.	Sekretariat DPRD .....	75
<b>4.5.</b>	<b>Usuran Kewilayahan .....</b>	<b>76</b>
4.5.1.	Kecamatan .....	76
<b>4.6.</b>	<b>Usuran Kesatuan Bangsa dan Politik .....</b>	<b>77</b>
4.6.1.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri .....	77
<b>BAB V</b>	<b>PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN</b>	
5.1.	Kerjasama antar Daerah .....	78
5.1.1.	Kebijakan dan Kegiatan .....	78
5.1.2.	Kegiatan Pertemuan APEKSI .....	78

5.1.3. Kegiatan Pertemuan AKKOPSI .....	79
5.2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga .....	79
5.3. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah .....	85
5.4. Pembinaan Batas Wilayah.....	85
5.5. Penanganan Bencana .....	86
5.6. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban umum.....	88
5.6.1. Gangguan Yang Terjadi.....	88
5.6.2. OPD Yang Terlibat Dalam Penanganan Ketertiban dan Ketertiban Umum .....	88
5.6.3. Penggulangan dan Kendala .....	89
5.6.4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dan Penggulangan .....	90

## **BAB VI      PENUTUP**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>	
Tabel.1.1	Jumlah Penduduk Kota Jambi Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016.....	4
Tabel.1.2	Jumlah Penduduk Kota Jambi Menurut kelompok usia Tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016.....	5
Tabel 1.3.	Jumlah Pencari Kerja Baru Dirinci menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016 .....	5
Tabel 1.4.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Jambi Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku 2014-2016.....	6
Tabel 3.1.	Dasar Pemungutan Pajak Terhadap Jenis Pajak/Retribusi Daerah .....	21
Tabel 3.2.	Perbandingan Target dan Realisasi PAD TA 2016 dengan TA 2017 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI) .....	22
Tabel 3.3.	Perbandingan Target dan Realisasi Dana Pertimbangan TA 2016 dengan TA 2017 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI) .....	24
Tabel 3.4.	Perbandingan Target dan Realisasi LLPDyS TA 2016 dengan TA 2017 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI) .....	25
Tabel 3.5.	Target dan Realisasi Pendapatan Kota Jambi TA 2017 (sebelum dilakukan audit BPK-RI).....	26
Tabel 3.6.	Komposisi Belanja Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI) .....	30
Tabel 3.7.	Perincian Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2017 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI) .....	30
Tabel 3.8.	Perincian Belanja Langsung Pemerintah Kota Jambi TA 2017 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI) .....	31
Tabel 3.9.	Komposisi Pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2017 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI) .....	32
Tabel. 3.10.	Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2017 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI) .....	33
Tabel. 3.11.	Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2017 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI) .....	33

Tabel 4.1.	Penghargaan Bidang Pendidikan yang diterima Pemerintah Kota Jambi Tahun 2017 .....	36
Tabel 5.1.	Daftar Izin Prinsip Yang Terbit Tahun 2017.....	80
Tabel 5.2.	Memorandum Of Understanding yang ditanda tangani oleh Pemerintah Kota Jambi dengan pihak ketiga Tahun 2017 .....	80
Tabel 5.3.	Kejadian Kebakaran Tahun 2017 Berdasarkan Kecamatan di Kota Jambi .....	87

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1.1. Perkembangan Inflasi Kota Jambi .....	8
Gambar 1.2. Perbandingan Inflasi (yoy) Kota Jambi dan Kota Lainnya di Pulau Sumatera Triwulan III 2017.....	8
Gambar 3.1. Persentase Kontribusi Tiap Komponen Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total PAD Kota Jambi T.A 2017 .....	23
Gambar 3.2. Capaian Target Hasil Dana Perimbangan Pemerintah Kota Jambi T.A 2017 .....	24
Gambar 3.3. Persentase Realisasi Pendapatan Kota Jambi Tahun Anggaran 2017.....	26
Gambar 3.4. Persentase Kontribusi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pembentukan Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2017 .....	27

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1040);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000



- Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
  16. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
  17. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 16) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2017 Nomor 10).

## 1.2. GAMBARAN UMUM DAERAH

### 1.2.1. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

Kota Jambi merupakan ibukota Provinsi Jambi yang lebih dikenal dengan sebutan “Tanah Pilih Pusako Betuah”. Wilayah Kota Jambi dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Muaro Jambi baik dari arah Utara, Selatan, Barat, maupun Timur. Luas Kota Jambi 169,02 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari :

a) Kecamatan Kotabaru	=	2.695,88 ha	(15,95 %)
b) Kecamatan Alam Barajo	=	3.668,14 ha	(21,70 %)
c) Kecamatan Jambi Selatan	=	751,41 ha	( 4,44 %)
d) Kecamatan Paal Merah	=	2.437,60 ha	(14,42 %)
e) Kecamatan Jelutung	=	763,98 ha	( 4,52 %)
f) Kecamatan Pasar Jambi	=	167,92 ha	( 0,99 %)
g) Kecamatan Telanaipura	=	1.910,59 ha	(11,31 %)
h) Kecamatan Danau Sipin	=	727,67 ha	( 4,31 %)
i) Kecamatan Danau Teluk	=	1.344,23 ha	( 7,95 %)
j) Kecamatan Pelayangan	=	1.065,79 ha	( 6,31 %)
k) Kecamatan Jambi Timur	=	1.368,68 ha	( 8,10 %)

Secara geografi wilayah Kota Jambi terletak di antara 103°40'1,67" Bujur Timur sampai 103°40'0,22" Bujur Timur. 01°30'2,98" Lintang Selatan sampai 01°40'1,07" Lintang Selatan.

Geografi wilayah Kota Jambi secara keseluruhan terdiri atas daratan dengan luas 16.901 ha atau 169,02 Km<sup>2</sup>. Topografi wilayah Kota Jambi terdiri dari sebagian besar datar (0-2%), bergelombang (2-15%), dan sedikit curam (15-40%).

Wilayah Kota Jambi memiliki ketinggian dengan kisaran 10 – 60 meter dari permukaan laut. Berdasarkan kecamatan, sebagian besar wilayah Kecamatan Pasar Jambi, Pelayangan, dan Danau Teluk berada pada ketinggian 0 – 10 meter dari permukaan laut, sedangkan wilayah Kecamatan Telanaipura, Jambi Selatan, Jambi Timur, dan Kotabaru sebagian besar berada pada ketinggian 10 – 40 meter dari permukaan laut.

Dari sisi iklim, Kota Jambi termasuk beriklim tropis. Musim hujan jatuh pada bulan Oktober sampai April (dipengaruhi oleh Musim Timur Selatan) dan musim kemarau pada bulan April sampai Oktober (dipengaruhi oleh Musim Barat).

Selama tahun 2017 rata-rata suhu di Kota Jambi berkisar antara 26,8°C sampai 27,8°C. Dengan suhu maksimum 35,0°C yang terjadi pada bulan Juli serta Oktober dan suhu minimum 21,2°C terjadi pada bulan Mei.

Curah hujan di Kota Jambi selama tahun 2017 beragam antara 70,1 mm sampai 233,6 mm, dengan jumlah hari hujan antara 11 hari sampai 25 hari per bulannya. Kecepatan angin di tiap bulan hampir merata antara 12 knots hingga 19 knots. Sedangkan rata-rata kelembaban udara berkisar 81% - 86%.

## 1.2.2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFI

Penduduk Kota Jambi adalah heterogen, jumlah penduduk Kota Jambi berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2016 tercatat 585.487 jiwa, dengan kepadatan 2.851 orang/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk menurut Kecamatan adalah:

- a) Kecamatan Kotabaru = 2.036 orang/Km<sup>2</sup>
- b) Kecamatan Alam Barajo = 2.274 orang/Km<sup>2</sup>
- c) Kecamatan Jambi Selatan = 5.357 orang/Km<sup>2</sup>
- d) Kecamatan Paal Merah = 3.280 orang/Km<sup>2</sup>
- e) Kecamatan Jelutung = 7.943 orang/Km<sup>2</sup>
- f) Kecamatan Pasar Jambi = 3.124 orang/Km<sup>2</sup>
- g) Kecamatan Telanaipura = 2.220 orang/Km<sup>2</sup>
- h) Kecamatan Danau Sipin = 6.059 orang/Km<sup>2</sup>
- i) Kecamatan Danau Teluk = 767 orang/Km<sup>2</sup>
- j) Kecamatan Pelayangan = 881 orang/Km<sup>2</sup>
- k) Kecamatan Jambi Timur = 4.166 orang/Km<sup>2</sup>

Menurut jenis kelamin, jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk berjenis kelamin perempuan (*sex ratio: 101,66*). Jumlah penduduk Kota Jambi menurut jenis kelamin dan kelompok usia dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel.1.1 Jumlah Penduduk Kota Jambi Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016

No	Penduduk	Jumlah			
		2013	2014	2015	2016
1	Laki-laki	286.289	285.492	289.713	293.217
2	Perempuan	283.042	282.570	286.354	290.270
	J u m l a h	569.331	568.062	576.067	583.487
	Sex Rasio	101,15	101,03	101,17	101,01

Sumber: Diolah dari Kota Jambi Dalam Angka 2014, 2015, 2016 dan 2017

Tabel.1.2 Jumlah Penduduk Kota Jambi  
Menurut kelompok usia Tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016

No	Kelompok Usia	Jumlah (orang)			
		2013	2014	2015	2016
1	0 – 14 tahun	155.431	146.722	148.672	148.302
2	15 – 59 tahun	382.226	387.970	392.119	397.897
3	60 tahun +	31.674	33.370	35.276	37.288
Jumlah		569.331	568.062	576.067	583.487

Sumber: Diolah dari Kota Jambi Dalam Angka 2014, 2015, 2016 dan 2017

Rata-rata Usia Harapan Hidup masyarakat Kota Jambi adalah 69,91 tahun. Dari aspek ketenagakerjaan, persentase pekerjaan penduduk Kota Jambi yang berusia diatas 15 tahun adalah:

1. Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan.....	51,26 %
2. Industri Pengolahan .....	4,31 %
3. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan&Hotel .....	16,99 %
4. Jasa Kemasyarakatan, Sosial & Perorangan Community, Social, and Personal Service .....	15,41 %
5. Lainnya ( <i>pertambangan dan penggalian, listrik, gas &amp; air, bangunan, angkutan, pergudangan&amp;komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan</i> ) .....	12,03 %

Jumlah pencari kerja baru yang terdaftar sepanjang tahun 2016 mencapai 2.919 orang, tabel berikut adalah rincian pencari kerja menurut tingkat pendidikan.

Tabel 1.3 Jumlah Pencari Kerja Baru  
Dirinci menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	SMK (sederajad)	25	40	65
2	SMA (sederajad)	353	386	739
3	STM (sederajad)	43	-	43
4	SMEA (sederajad)	169	132	301
5	Sarjana Muda	213	216	423
6	S 1	664	676	1.340
7	S 2	1	1	2
JUMLAH		1.468	1.451	2.919

Sumber: Kota Jambi Dalam Angka 2017

### 1.2.3. KONDISI EKONOMI

#### 1.2.3.1. EKONOMI DAERAH

##### a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Jambi pada tahun 2016 sebesar 6,81 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada sektor Transportasi dan Pergudangan yaitu sebesar 12,42 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar minus 2,86 persen.

Jika ditinjau menurut lapangan usaha, laju pertumbuhan PDRB Kota Jambi Tahun 2016 tetap didominasi oleh usaha yang berkaitan dengan aktivitas perkotaan. Lapangan usaha yang tumbuh diatas rata-rata pertumbuhan PDRB adalah sektor Transportasi dan Pergudangan (12,42%), sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (12,11), sektor Informasi dan Komunikasi (8,65%), sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (8,24%), sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (7,69%), Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (7,14%), seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.4.  
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto  
Kota Jambi Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014-2016 (persen)

No	Uraian	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,45	2,58	1,78
2	Pertambangan dan Penggalian	0,78	-22,30	-2,86
3	Industri Pengolahan	6,58	5,17	4,23
4	Pengadaan Listrik dan Gas	17,53	6,55	5,87
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,26	2,97	4,17
6	Bangunan	4,07	2,50	4,13
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,41	12,13	7,69
8	Transportasi dan Pergudangan	8,21	5,70	12,42
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	20,07	4,10	8,24
10	Informasi dan Komunikasi	3,82	9,36	8,65
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,35	1,85	12,11
12	Real Estate	4,02	2,43	4,90
13	Jasa Perusahaan	6,16	6,82	6,54
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	14,63	6,42	2,98
15	Jasa Pendidikan	1,32	7,64	6,33
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	15,51	10,28	7,14
17	Jasa Lainnya	3,25	7,99	6,28
	<b>PDRB</b>	<b>8,18</b>	<b>5,57</b>	<b>6,81</b>

Sumber: BPS Kota Jambi 2017

## **b. Struktur Ekonomi**

Dalam pembentukan struktur perekonomian di Kota Jambi berdasarkan PDRB Seri 2010 atas dasar harga berlaku tahun 2016, Sektor Transportasi dan Pergudangan memberikan kontribusi tertinggi, yaitu sebesar 12,42 persen. Selanjutnya Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi yaitu sebesar 12,11 persen dan kemudian diikuti oleh Sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 8,65 persen.

Sedangkan 3 sektor yang memberikan kontribusi terendah berturut-turut adalah sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 2,98 persen, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,78 persen dan sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar minus 2,86 persen.

## **c. Pendapatan Per kapita**

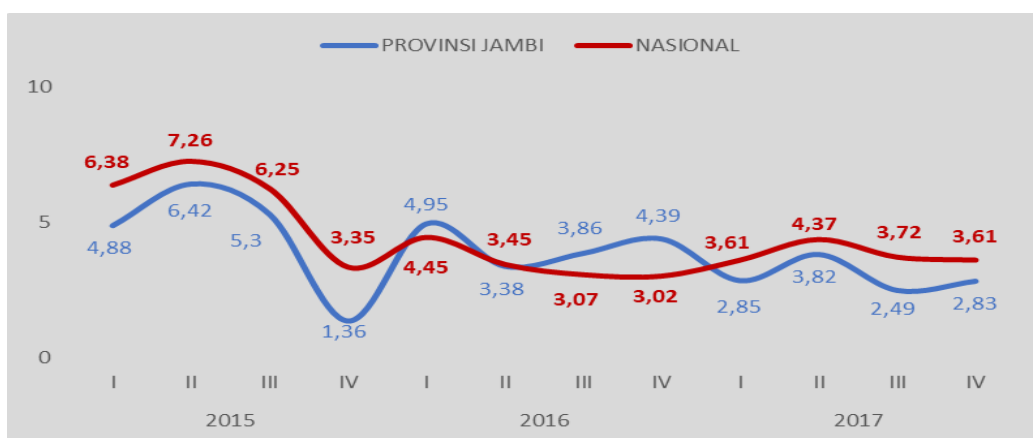
Untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk Kota Jambi dapat dilihat melalui Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita. Berdasarkan atas harga berlaku, PDRB perkapita Kota Jambi pada tahun 2014 sebesar 18,98 juta rupiah, meningkat menjadi 21,35 juta rupiah pada tahun 2015 dan menjadi 24,45 juta rupiah pada tahun 2016.

## **d. Tingkat inflasi**

Pada Triwulan III-2017, inflasi Provinsi Jambi tercatat 2,49% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (3,82% yoy) dan inflasi nasional (3,72% yoy). Inflasi Provinsi Jambi merupakan komposit dari inflasi Kota Jambi sebesar 2,32% (yoy) dan inflasi Kabupaten Bungo sebesar 4,03% (yoy).

Kenaikan tingkat inflasi di Provinsi Jambi utamanya disebabkan oleh kenaikan inflasi pada kelompok administered prices menjadi sebesar 4,46% (yoy), meskipun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (7,44% yoy). Inflasi juga terjadi pada komoditas inti (core inflation) sebesar 3,38% (yoy), sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya (3,44% yoy). Sementara inflasi bahan pangan bergejolak (volatile foods) tercatat mengalami deflasi 1,83% (yoy) setelah triwulan sebelumnya mengalami inflasi sebesar 0,87% (yoy). (gambar 1.1).

Gambar 1.1  
Perkembangan Inflasi Kota Jambi

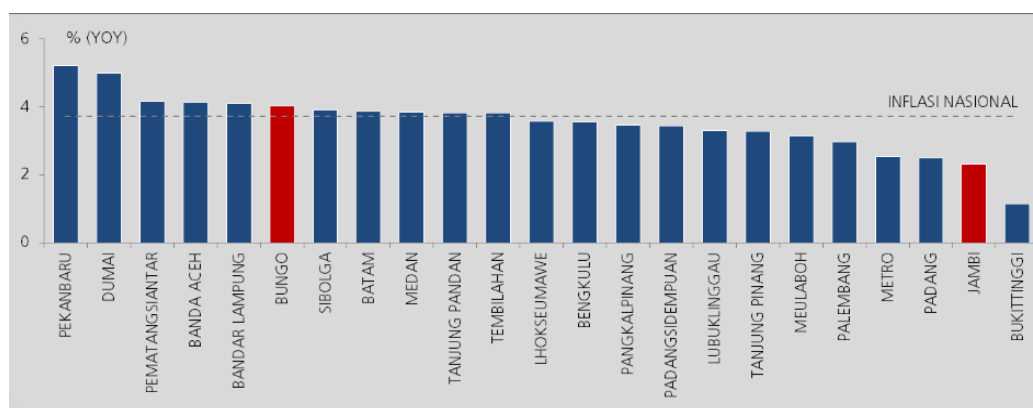


Sumber: Bank Indonesia

Berdasarkan kelompoknya, tingginya inflasi Kota Jambi utamanya disebabkan oleh inflasi yang terjadi pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar sebesar 6,12% (yoy) dengan kontribusi inflasi sebesar 1,34%, dari sebelumnya mengalami inflasi 6,96% (yoy) pada Triwulan II-2017, serta secara triwulanan mengalami inflasi sebesar 0,20% (qtq). Tingginya inflasi kelompok tersebut dipicu oleh inflasi sub kelompok bahan bakar, penerangan, dan air sebesar 12,59% (yoy) meskipun secara triwulanan mengalami deflasi sebesar 0,11% (qtq).

Tingkat inflasi di Kota Jambi berada di urutan ke-22 (dua puluh dua) dari 23 kota di Sumatera. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Pekanbaru, sedangkan inflasi terendah terjadi di Kota Bukit Tinggi. (gambar 1.2).

Gambar 1.2.  
Perbandingan Inflasi (yoy) Kota Jambi dan Kota Lainnya  
di Pulau Sumatera Triwulan III 2017



Sumber: Bank Indonesia

### **1.3. POTENSI UNGGULAN DAERAH**

#### **a. Perdagangan, Hotel dan Restoran**

Lapangan usaha sektor perdagangan merupakan andalan perekonomian Kota Jambi, terdapat beberapa bidang usaha yang merupakan peluang dan potensi untuk dikembangkan, yaitu:

1. Perdagangan besar, retail dan tradisional
2. Pengembangan dan Pembangunan restoran dan rumah makan
3. Pengembangan resort wisata
4. Pengembangan produk perhotelan

#### **b. Pengangkutan dan Komunikasi**

Sebagai kawasan perkotaan, mobilitas masyarakat sangat tinggi untuk memobilisasi sumberdaya yang keluar masuk Kota Jambi. Untuk memenuhi permintaan akan layanan transportasi dan komunikasi terdapat peluang potensi usaha untuk dikembangkan, yaitu:

1. Pengembangan Teknologi Informasi
2. Pengembangan pelabuhan sungai Batanghari untuk kegiatan industri dan pariwisata
3. Pengembangan transportasi darat untuk pengangkutan umum

#### **c. Industri Pengolahan**

Kota Jambi memiliki potensi khas yang memiliki citarasa dan corak tersendiri, kekhasan ini memiliki peluang ekonomi yang cukup menjanjikan dengan pengelolaan aktivitas dengan pola industrial yang berorientasi pada pasar regional dan nasional. Adapun potensi yang dapat dikembangkan adalah:

Kerajinan tradisional khas Jambi (batik, songket dan sulaman emas)

1. Makanan khas Jambi
2. Industri makanan dan minuman dalam kemasan
3. Industri Pengolahan/Kerajinan Hasil Perkebunan dan Kehutanan

#### **d. Jasa-jasa**

1. Usaha jasa biro perjalanan
2. Jasa Perbankan dan Keuangan lainnya
3. Jasa Pendidikan
4. Pelayanan Kesehatan
5. Hiburan dan Olahraga



## BAB II

### KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

#### 2.1. VISI MISI

Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu dipertegas dengan bagaimana upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) Tahun. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi periode 2013-2018, telah ditetapkan Visi dan Misi Kota Jambi, yaitu sebagai berikut:

#### VISI

##### **“TERWUJUDNYA KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT YANG BERAKHLAK DAN BERBUDAYA”**

Batasan konsep terhadap ide yang terdapat dalam visi diatas adalah sebagai berikut:

- **Pusat Perdagangan dan Jasa:** sesuai dengan rencana pola ruang dan rencana zonasi RTRWK, pusat perdagangan dan jasa merupakan kawasan pengembangan aktivitas perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan lokal maupun regional
- **Berbasis Masyarakat:** berbasis masyarakat merupakan suatu upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menela'ah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dilingkungannya serta bersedia untuk menerima perubahan
- **Berakhlak:** Akhlak berarti prilaku, sikap, perbuatan, adat dan sopan santun. Berakhlak berarti seluruh prilaku masyarakat Kota Jambi harus bersikap sopan santun, baik yang memberikan pelayanan maupun yang menerima pelayanan
- **Berbudaya:** Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal dan pikiran yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan ide dan gagasan. Oleh karena itu masyarakat Kota Jambi harus memiliki etika moral, nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab agar bermakna bagi pembangunan.

#### MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut maka dijabarkan kedalam 5 Misi yang menjadi pedoman bagi Pembangunan Kota Jambi, yaitu:

1. Membangun infrastruktur perkotaan yang merata dan berwawasan lingkungan

2. Meningkatkan perekonomian kota berbasis potensi lokal menuju kemandirian daerah
3. Mewujudkan masyarakat kota yang berkualitas, berakhlak, berbudaya dan berdaya saing
4. Mewujudkan pemerintahan yang profesional dan bersih (*clean governance*)
5. Meningkatkan kesejahteraan sosial, keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam bingkai kearifan lokal.

## **2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH**

### **2.2.1. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH**

Strategi pembangunan daerah pada dasarnya merupakan pendekatan yang akan dilakukan pemerintah bersama masyarakat Kota Jambi untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi tersebut telah dirumuskan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi. Strategi pembangunan secara umum mencakup (a) hubungan yang rasional antara visi dan misi dengan prioritas program kepala daerah terpilih, (b) hubungan yang kuat dengan analisis daerah dan isu-isu strategik, (c) pernyataan yang umum guna memandu pengembangan program pembangunan tahunan selama lima tahun, dan (d) dikembangkan dalam suatu pemetaan strategi daerah.

Strategi pembangunan daerah Kota Jambi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013–2018 adalah:

1. Pemantapan peran dan fungsi kota
2. Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta
3. Penyediaan ruang yang nyaman dan berkelanjutan
4. Pengurangan timbunan sampah dari sumbernya
5. Pengembangan kewirausahaan dan penyediaan ruang yang representatif untuk kegiatan perdagangan dan jasa
6. Peningkatan mutu dan akses pendidikan
7. Peningkatan mutu dan akses kesehatan
8. Peningkatan toleransi antar umat beragama
9. Peningkatan penyerapan tenaga kerja
10. Penurunan angka kelahiran
11. Peningkatan peran perempuan di pemerintahan
12. Peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan publik
13. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
14. Peningkatan penanganan dan pelayanan PMKS

15. Penyediaan, peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana kegiatan pemuda, seni budaya dan olah raga
16. Peningkatan jumlah dan kualitas tujuan wisata

## 2.2.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Arah Kebijakan Pembangunan merupakan langkah nyata untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada setiap misi yang dijalankan guna pencapaian visi. Adapun arah kebijakan pembangunan daerah Kota Jambi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar
2. Meningkatkan dan menata sarana dan prasarana perhubungan
3. Menata, mengelola dan memantapkan ruang kota dan LH
4. Meningkatkan dan memperluas RTH
5. Meningkatkan kinerja dan cakupan pengelolaan persampahan
6. Mendorong dan meningkatkan tumbuh kembangnya wirausaha baru
7. Meningkatkan rasio populasi usia sekolah
8. Meningkatkan mutu tenaga pendidik
9. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan
10. Meningkatkan mutu tenaga medis dan paramedis
11. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan
12. Meningkatkan pelayanan kesehatan
13. Meredam potensi konflik antar umat beragama
14. Mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja
15. Mendorong partisipasi aktif pasangan usia subur
16. Meningkatkan porsi perempuan dalam jabatan pemerintahan
17. Menerapkan SOP dalam pelayanan publik
18. Menerapkan mekanisme penilaian kinerja aparatur dan standar pelayanan minimal
19. Meningkatkan penyuluhan, pembinaan dan penanganan PMKS
20. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin
21. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan sarana dan prasarana kegiatan pemuda, seni budaya dan olahraga
22. Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana tujuan wisata
23. Memberdayakan lembaga adat dan mengembangkan nilai-nilai budaya daerah
24. Meningkatkan promosi dan pelayanan kepariwisataan

## **2.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Untuk mewujudkan visi, misi melalui strategi dan arah kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka telah disusun program-program pembangunan beserta indikator kinerja daerah yang diharapkan dapat tercapai selama kurun waktu 5 tahun periode RPJMD 2013–2018. Indikator kinerja daerah akan diimplementasikan oleh SKPD terkait melalui target kinerja tahunan yang terukur, terarah dan terkendali dalam rangka mewujudkan *sustainable development*.

Adapun prioritas pembangunan untuk mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah Kota Jambi adalah sebagai berikut:

1. Percepatan peningkatan dan perluasan pembangunan infrastruktur,
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia,
3. Percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi dan investasi
4. Tata kelola pemerintahan yang baik,
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup,
6. Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan sosial.

Pada tahun 2017, 6 (enam) program prioritas pembangunan tersebut dijabarkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut:

### **2.3.1. PERCEPATAN PENINGKATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**

Dalam rangka mendukung perkembangan aktivitas masyarakat dan perekonomian yang semakin meningkat, maka perlu penyediaan infrastruktur yang seimbang. Infrastruktur fisik di Kota Jambi belum seimbang dengan perkembangan tersebut, akibatnya terjadi permasalahan transportasi darat (kemacetan), banjir, sampah, dan sanitasi kota. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kualitas infrastruktur dasar perkotaan yang diarahkan untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkualitas. Infrastruktur yang berkualitas disamping akan meningkatkan akses masyarakat juga akan meningkatkan daya saing Kota Jambi.

Percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur akan diwujudkan melalui 11 (sebelas) program yaitu ;

- 1) Program peningkatan kualitas lingkungan pemukiman berbasis kawasan
- 2) Program pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
- 3) Program pembangunan dan pemeliharaan dan perluasan utilitas perkotaan
- 4) Program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan

- 5) Program Peningkatan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan Persampahan
- 6) Program perencanaan tata ruang
- 7) Program pengendalian dan pemanfaatan ruang
- 8) Program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan
- 9) Program peningkatan pengelolaan dan keselamatan perhubungan
- 10) Program peningkatan pelayanan perparkiran
- 11) Program peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

### 2.3.2. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan yang mencakup seluruh siklus hidup manusia. Oleh karena itu pembangunan SDM diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, hal ini akan tercermin dari makin tingginya derajat kesehatan masyarakat, tingkat pendidikan, dan pendapatan penduduk, serta dimilikinya nilai budaya yang berorientasi ke masa depan.

Untuk mengimplementasikan arah kebijakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Kota Jambi akan dilaksanakan 5 (lima) program sebagai berikut ;

- 1) Program peningkatan akses, mutu dan tata kelola pendidikan
- 2) Program pembinaan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan
- 3) Program Pembinaan, peningkatan dan perluasan pengelolaan budaya dan pariwisata
- 4) Program peningkatan mutu dan pelayanan perpustakaan
- 5) Program peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

### 2.3.3 PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI

Kontribusi sektor industri, perdagangan dan jasa terhadap pertumbuhan ekonomi kota Jambi mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Hal ini sangat ditentukan oleh nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor. Berkenaan hal tersebut Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan UMKM memegang peranan strategis dalam pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu IKM dan UMKM menjadi perhatian khusus melalui pola pengembangan kebijakan yang terarah sehingga IKM dan UMKM akan menjadi motor penggerak perekonomian sektor riil di Kota Jambi.

Untuk mewujudkan peningkatan kinerja ekonomi yang merata dan berkelanjutan tersebut maka sasaran yang akan diwujudkan adalah meningkatkan produktivitas UMKM, IKM

dan aktivitas perekonomian, menciptakan iklim investasi yang kondusif serta penataan PKL dan pasar-pasar tradisional. Sasaran ini akan diwujudkan dengan melaksanakan 8 (delapan) program sebagai berikut:

- 1) Program pembinaan, pengembangan, peningkatan dan pengawasan industri Kecil dan Menengah
- 2) Program peningkatan pelayanan pengelolaan perpasaran
- 3) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM
- 4) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
- 5) Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas dan Perlindungan Tenaga Kerja
- 6) Program peningkatan produksi, mutu produk, dan diversifikasi sektor pertanian, peternakan dan perikanan
- 7) Program peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan pemberdayaan petani
- 8) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

#### 2.3.4. TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Peran Pemerintah Daerah adalah sebagai unit pemerintahan di tingkat lokal yang berfungsi untuk menyediakan dan melaksanakan pelayanan publik secara efektif, efisien, dan ekonomis. Dalam mengelola sumber daya daerah, pemerintah kota Jambi harus memiliki sumber daya aparatur yang berkualitas yaitu memiliki kemampuan teknis dan manajerial, serta komitmen yang tinggi agar dapat menjamin tercapainya tujuan pelaksanaan *good governance* dan kemandirian daerah.

Arah Kebijakan yang ditempuh untuk mendorong optimalisasi pranata pemerintahan adalah: Menciptakan aparatur pemerintah yang memiliki kapabilitas, integritas, berkualitas dan akuntabel melalui 20 (dua puluh) program sebagai berikut:

- 1) Program optimalisasi penyebaran informasi penyelenggaraan pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi
- 2) Program pemberdayaan kecamatan dan kelurahan
- 3) Program pemeliharaan dan penyelenggaraan tramtibum serta penegakan regulasi daerah
- 4) Program Pembinaan dan Pemeliharaan Perlindungan Masyarakat
- 5) Program peningkatan dan pengelolaan pendapatan daerah
- 6) Program pembinaan dan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
- 7) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- 8) Program pembinaan, pemberdayaan dan fasilitas bagi orkemas dan parpol
- 9) Program penataan peraturan perUU dan penyelesaian perkara pemerintah daerah

- 10) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah
- 11) Program peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- 12) Program peningkatan Pelayanan Kedinasan DPRD
- 13) Program peningkatan kerja sama antara Pemerintah daerah
- 14) Program Peningkatan kualitas dan pengelolaan pelayanan publik
- 15) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, sekda, aparaturnya dan keprotokolan
- 16) Program peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan Setda dan kerumahtanggaan
- 17) Program tata kelola organisasi pemerintahan dan administrasi pembangunan
- 18) Program peningkatan sistem pengawasan, pembinaan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- 19) Program peningkatan tata kelola adm. kependudukan
- 20) Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

#### 2.3.5. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP PERKOTAAN

Manusia memiliki kemampuan eksploitatif terhadap lingkungan sehingga mampu mengubah lingkungan sesuai dengan yang dikehendaki. Apabila hal ini tidak diantisipasi maka akan muncul dampak negatif seperti penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan yang signifikan. Permasalahan lingkungan di Kota Jambi, lebih disebabkan oleh faktor internal sebagai dampak dari aktivitas penduduk Kota Jambi seperti sanitasi lingkungan, persampahan dan polusi udara serta air yang disebabkan oleh aktivitas lokal. Oleh karena itu dalam rangka menjaga keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi ke langsunan hidup masyarakat, maka akan dilaksanakan 3 (tiga) program dibawah ini:

- 1) Program peningkatan pengelolaan lingkungan, RTH, ruang publik dan keanekaragaman hayati
- 2) Program Peningkatan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan Persampahan Program penurunan beban pencemaran

#### 2.3.6. PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Kesejahteraan sosial yang akan diwujudkan adalah suatu kondisi dimana masyarakat kota Jambi dapat memenuhi kebutuhan material, spiritual dan sosial, sehingga

dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Masih tingginya angka pengangguran dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta angka vertilitas merupakan isu pokok kesejahteraan. Oleh karena itu pemerintah kota Jambi telah merumuskan upaya-upaya konkrit jangka pendek, seperti melakukan pelatihan, pembinaan dan pemberian bantuan usaha kepada masyarakat yang membutuhkan masih terus dilakukan.

4 (empat) Program yang dilakukan dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan sosial yaitu sebagai berikut:

- 1) Program keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat
- 3) Program Pembinaan keagamaan dan Fasilitasi bagi Organisasi dan Kegiatan Keagamaan
- 4) Program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan PMKS



### BAB III

## KEBIJAKAN UMUM

## PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengelolaan keuangan yang baik ialah pengelolaan yang bisa mengoptimalkan potensi-potensi pembangunan suatu daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah meningkatkan peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengelola pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sebagai konsekuensi pembebanan tugas dan tanggung jawab ke daerah yang semakin besar, kepada daerah telah diserahkan sumber pendanaan yang terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, baik melalui skema transfer maupun penyerahan kewenangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab, serta asas tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang merupakan penugasan dari pemerintah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain kedua Undang-undang tersebut, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah, antara lain: (i) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (ii) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (iii) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan (iv) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dirubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kota Jambi dalam menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017, berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya atas dasar tersebut dan berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara pihak legislatif dengan Pemerintah Kota Jambi, maka ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, struktur APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2017 terdiri atas: (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; serta (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pada komponen pendapatan terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Sedangkan pada komponen Belanja terdiri atas: (1) Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; (2) Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Sementara komponen Pembiayaan terdiri atas: (1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun

Sebelumnya, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah, (2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; (3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yang mana datanya berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016.

Untuk dapat menggerakkan fungsi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik, maka diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Jambi untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Jambi yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang APBD maupun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut.

### **3.1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Sumber-sumber Penerimaan Daerah diperoleh dari :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari :

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Sampai dengan tahun 2017 pelaksanaan pemungutan Pajak/Retribusi Daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta ketentuan lain yang masih berlaku seperti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Atas dasar ketentuan perundang-undangan di atas dan untuk pelaksanaan/pengelolaannya di Kota Jambi, maka Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.**  
**Dasar Pemungutan Pajak terhadap Jenis Pajak/Retribusi Daerah**

<b>NO</b>	<b>JENIS PAJAK / RETRIBUSI</b>	<b>DASAR PEMUNGUTAN (Perda Kota Jambi)</b>
1.	Retribusi Jasa Usaha	Perda No.11 Tahun 2017
2.	Retribusi Jasa Umum	Perda No.12 Tahun 2017
3.	Retribusi Tertentu	Perda No.13 Tahun 2017

### 3.1.1. INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan PAD dimana realisasi dicapai sesuai dengan rencana/target dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan/penerimaan pajak dan retribusi daerah, pada tahun 2017 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- Melakukan evaluasi dan pengkajian perkembangan pajak dan retribusi daerah guna mendapatkan data potensi pajak dan retribusi daerah dari obyek pajak dan retribusi daerah.
- Menyelenggarakan tertib administrasi perpajakan daerah guna mendapatkan data obyek pajak daerah yang lebih akurat.
- Mengoptimalkan pelaksanaan pendataan melalui survey lapangan terhadap perkembangan/perubahan data objek pajak dan retribusi daerah. Melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan wajib pajak seperti tutup usaha, perubahan tempat, ukuran dan lain sebagainya.
- Penyampaian Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah.
- Penyelesaian serta pengecekan atas keberatan Wajib Pajak/Wajib Retribusi Daerah.
- Penagihan atas tunggakan Pajak kepada Wajib Pajak/Retribusi Daerah.
- Terlaksananya tertib administrasi ketetapan dan administrasi tunggakan Pajak/Retribusi Daerah.
- Melakukan pengkajian Peraturan-peraturan Daerah tentang Pajak Daerah sesuai Undang-undang yang berlaku.

### 3.1.2 TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN

Target Pendapatan Kota Jambi sampai dengan Perubahan APBD Tahun 2017 adalah sebesar Rp 1.544.367.408.169,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp 1.439.557.182.520,16 (93,21 %) yang bersumber dari :

- Pendapatan Asli Daerah
- Dana Perimbangan
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari :

- Hasil Pajak Daerah
- Hasil Retribusi Daerah
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

#### a. Target dan Realisasi Penerimaan PAD

Realisasi penerimaan PAD Kota Jambi Tahun 2017 mencapai Rp 336.709.912.456,56 atau 86,02 % dari target penerimaan sebesar Rp 390.892.633.600,00 dan memberikan kontribusi sebesar 23,39 % terhadap pendapatan Kota Jambi Tahun 2017 (mengalami peningkatan sebesar 116,95 % dibandingkan tahun 2016). Jika dibandingkan dengan jumlah Penerimaan PAD Tahun 2016 yakni sebesar Rp 287.564.676.504,49 maka PAD Tahun 2017 meningkat 17,09 % atau naik Rp 49.145.235.952,07.

Tabel berikut menunjukkan Perbandingan Target dan Realisasi PAD Tahun 2016 dengan Tahun 2017.

**Tabel 3.2.**  
**Perbandingan Target dan Realisasi PAD TA 2016 dengan TA 2017**  
**(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)**

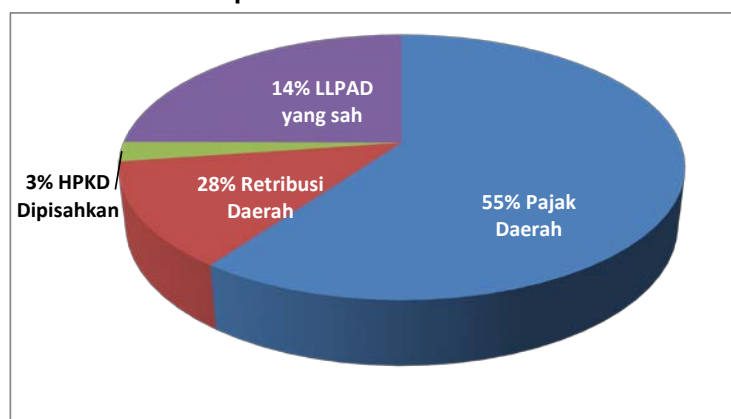
No	Uraian	Target 2016 (000)	Realisasi 2016 (000)	% Realisasi	Target 2017 (000)	Realisasi 2017 (000)	% Realisasi
1.	Pajak Daerah	187.252.000	158.740.884	84,77	198.940.000	201.429.750	101,25
2.	Ret. Daerah	73.679.471	80.718.526	93,27	46.403.840	43.017.469	92,70
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg di pisahkan	8.000.000	7.266.051	90,83	8.060.000	8.066.340	100,08
4.	Lain-lain PAD yg sah	47.532.302	40.839.214	85,92	137.488.793	83.684.231	60,87
<b>TOTAL</b>		<b>316.463,773</b>	<b>287.564.676</b>	<b>90,87</b>	<b>390.892.633</b>	<b>336.251.791</b>	<b>86,02</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2017

Diketahui bahwa komponen hasil pajak daerah mencapai target yang telah direncanakan semula. Dari target Hasil Pajak Daerah sebesar Rp 198.940.000.000,00 ternyata realisasinya mencapai Rp 201.429.750.000,00 atau melebihi target sebesar 1,25 %. Sedangkan realisasi Retribusi Daerah kurang dari target yang telah ditetapkan (92,70%). Untuk PAD yang diperoleh dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Tahun 2017 ini melebihi target yang telah ditetapkan (100,08 %), sedangkan PAD yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 60,87%.

Gambar berikut menunjukkan kontribusi komponen PAD terhadap Total PAD Kota Jambi Tahun 2017.

**Gambar 3.1**  
**Persentasi Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total PAD Kota Jambi T.A 2017**



#### **b. Target dan Realisasi Dana Perimbangan**

Dana perimbangan yang diterima Kota Jambi terdiri dari pos bagi hasil pajak dan bukan pajak/sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Target dana perimbangan adalah sebesar Rp 1.057.789.912.674,00 dan realisasinya mencapai Rp 1.013.005.895.282,00 atau mencapai 95,77 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut yang menunjukkan Perbandingan Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2016 dengan Tahun 2017 berikut ini:

**Tabel 3.3.**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Dana Perimbangan**  
**TA 2016 dengan TA 2017 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)**

No	Uraian	Target 2016 (000)	Realisasi 2016 (000)	% Realisasi	Target 2017 (000)	Realisasi 2017 (000)	% Realisasi
1.	Bagi Hasil Pajak	69.794.780	67.631.890	96,90	74.200.629	67.301.369	90,70
2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	14.667.864	35.096.083	239,27	37.305.300	41.035.354	110
3.	Dana Alokasi Umum	727.564.344	727.564.344	100,00	714.783.378	714.783.378	100
4.	Dana Alokasi Khusus	373.613.457	347.564.966	93,03	231.500.605	189.885.793	82,02
<b>TOTAL</b>		<b>1.185.640.446</b>	<b>1.177.857.284</b>	<b>99,34</b>	<b>1.057.789.912</b>	<b>1.013.005.895</b>	<b>95,77</b>

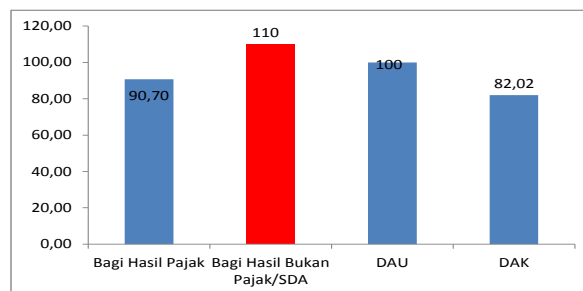
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2017

Pos bagi hasil pajak dan bukan pajak terdiri dari : bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan, bagi hasil PPh pasal 21, 25 dan 29 serta bagi hasil bukan pajak/SDA. Target pos bagi hasil pajak dan bukan pajak adalah sebesar Rp 111.505.929.674,00 realisasinya mencapai Rp 108.336.723.000,00 atau 97,16 %.

Untuk Bagi Hasil Pajak saja terealisasi 90,70 % (Rp 67.301.369.000,00) dari target Rp 74.200.629.000,00. Sementara untuk bagi hasil bukan pajak/SDA terealisasi Rp 41.035.354.000,00 (110 %) dari target Rp 37.305.300.000,00.

Target penerimaan dari pos Dana Alokasi Umum tahun 2017 adalah sebesar Rp 714.783.378.000,00 dan realisasinya mencapai Rp 714.783.378.000,00 atau 100 %, sedangkan pada penerimaan dari Pos Dana Alokasi Khusus hanya mencapai realisasi sebesar 82,02 % yaitu Rp 189.885.793.000,00.

**Gambar 3.2.**  
**Capaian Target Hasil Dana Perimbangan**  
**Pemerintah Kota Jambi T.A 2017**



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2017

**c. Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diperoleh dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terakhir Bantuan Keuangan dari Provinsi Jambi. Selama tahun 2017, ditargetkan Pendapatan dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar Rp 86.964.861.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 80.760.495.000,00 (92,87 %). Sedangkan pendapatan hibah sebesar Rp 2.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 2.819.000.000,00 (140,95 %). Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya ditargetkan sebesar Rp 6.720.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 6.720.000.000,00 (100%). Dengan demikian Total Target pendapatan dari pos lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah sebesar Rp 95.684.861.895,00 sedangkan total realisasi yang tercapai sebesar Rp 90.299.495.000,00 atau sebesar 94,37%.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut menunjukkan Perbandingan Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2016 dengan Tahun 2017 di bawah ini:

**Tabel 3.4.**  
**Perbandingan Target dan Realisasi LLPDyS TA 2016 dengan TA 2017**  
**(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)**

No	Uraian	Target 2016 (000)	Realisasi 2016 (000)	% Realisasi	Target 2017 (000)	Realisasi 2017 (000)	% Realisasi
1.	Pendapatan Hibah	39.039.797	39.039.796	100	2.000.000	2.819.000	140,95
2.	Dana Darurat	0	0	0	0	0	0
3.	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemda lainnya	77.180.986	66.598.538	86,29	86.964.861	80.760.495	92,87
4.	Dana Penyesuaian Otsus	0	311.385	0	0	0	0
5.	Bantuan Keuangan dr Provinsi Jambi	4.385.100	0	0	6.720.000	6.720.000	100
<b>TOTAL</b>		<b>120.605.883</b>	<b>105.949.720</b>	<b>88,26</b>	<b>95.684.861</b>	<b>90.299.495</b>	<b>94,37</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2017

Berdasarkan penjelasan mengenai target dan realisasi penerimaan daerah menurut jenis penerimaan di atas, maka realisasi total pendapatan daerah adalah Rp 1.439.557.182.520,16 atau terealisasi 93,21 % dari target sebesar



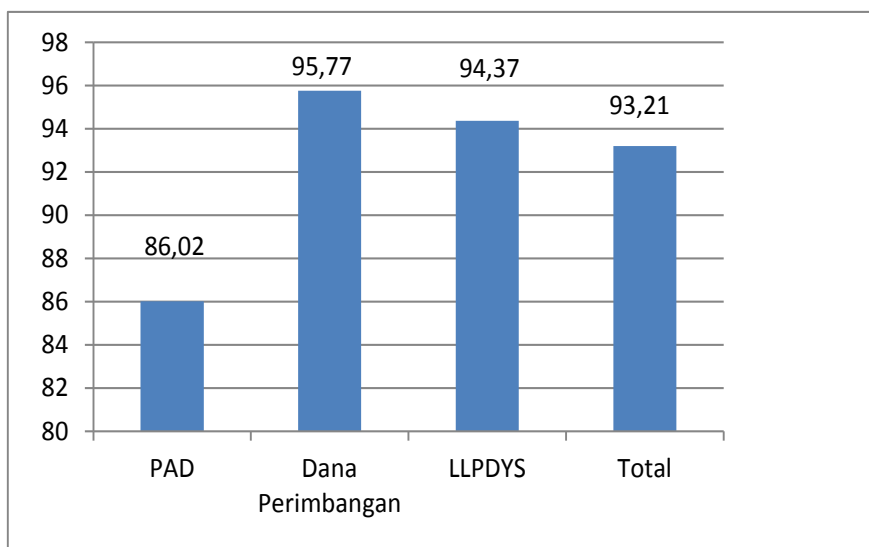
Rp 1.544.367.408.169,00 Target dan realisasi pendapatan Kota Jambi Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.5 dan Gambar 3.3 berikut.

**Tabel 3.5**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Kota Jambi TA 2017**  
**(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)**

No	Jenis	Target	Realisasi	% dari Target
1	PAD	390.892.633	336.251.792	86,02
2	Dana Perimbangan	1.057.789.913	1.013.005.895	95,77
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	95.684.862	90.299.495	94,,37
	<b>Total</b>	<b>1.544.367.408</b>	<b>1.439.557.182</b>	<b>93,21</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2017

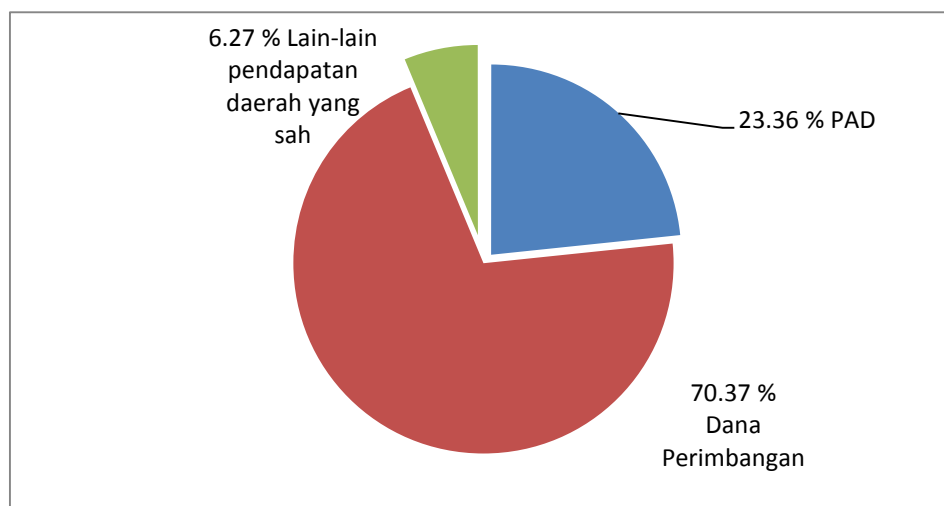
**Gambar 3.3**  
**Persentase Realisasi Pendapatan**  
**Kota Jambi T.A 2016**



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2017

Selanjutnya, jika dilihat dari komposisi anggarannya, terlihat bahwa PAD menyumbang 23,36% dari total pendapatan Kota Jambi Tahun 2017. Sedangkan untuk Dana Perimbangan memberikan kontribusi terbesar, yaitu 70,37% dan sisanya sebesar 6,27% ialah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

**Gambar 3.4**  
**Persentase Kontribusi komponen pendapatan terhadap total pembentukan**  
**pendapatan daerah Kota Jambi T.A 2017**



Kontribusi PAD Kota Jambi yang sebesar 23,36% di Tahun 2017 ini relatif lebih baik jika dibandingkan dengan rerata kontribusi PAD Kabupaten/Kota secara nasional yang hanya berada dikisaran 8,5 % di Tahun 2017. Namun angka ini masih menunjukkan bahwa Kota Jambi memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap pemerintah pusat.

### 3.1.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

#### a. Permasalahan

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 16,93 % dari tahun 2016. Sementara itu, dari sisi penerimaan hasil pajak daerah sebesar Rp 201.429.750.673,90 (101,25 %) dari target 198.940.000.000,00 pada tahun 2017 ini. Ada beberapa permasalahan yang ditemui dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi antara lain :

- Masih adanya wajib pajak tidak menyampaikan informasi tentang pindah alamat maupun tutup usaha, yang berdampak pada ketidak akuratan data pajak, sehingga menyulitkan operasional pendataan dilapangan.
- Masih ditemuinya wajib pajak menyampaikan data-data tempat usaha tidak secara lengkap.
- Masih ada pemasangan reklame dilapangan tanpa terlebih dahulu melalui mekanisme/ prosedur perizinan sehingga berdampak pada penerimaan pajak.

- Terbatasnya tenaga teknis (staf) dalam Pendataan, penyampaian dan penagihan tunggakan kepada Wajib Pajak dan Retribusi Daerah.
- Masih banyaknya piutang/Retribusi Daerah yang sulit ditagih karena sudah tutup usaha atau pindah alamat tanpa memberikan informasi.
- Belum adanya sistem komputerisasi yang online pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi menyebabkan pelayanan kepada wajib pajak belum optimal.
- Kewajiban Wajib Pajak/Wajib Retribusi masih kurang.
- Sanksi/punishment bagi Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang melalaikan kewajiban membayar Pajak/Retribusi belum Optimal.

#### **b. Solusi**

Untuk lebih mengoptimalkan peningkatan pendapatan perlu dilakukan upaya antara lain :

- Terus mengoptimalkan peran dan fungsi staf serta keterlibatan RT untuk melaksanakan operasional pendataan pajak dilapangan.
- Terus melakukan pengawasan.
- Untuk menertibkan administrasi diperlukan penghapusan tunggakan pajak/ retribusi daerah serta penghapusan NPWPD bagi wajib pajak yang tidak aktif.
- Penambahan tenaga tehnis untuk memantau dan mendata wajib pajak/retribusi yang tersebar di berbagai kecamatan dalam Kota Jambi.
- Adanya sistem komputerisasi yang online agar administrasi penerimaan pajak/ retribusi dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akurat.
- Untuk memperlancar penyampaian Surat Ketetapan Pajak dan Penagihan terhadap wajib pajak/ retribusi daerah sangat diperlukan sarana kendaraan roda dua.
- Meningkatkan Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi pemungut.
- Penerapan Sanksi agar lebih tegas.

### **3.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

#### **3.2.1. KEBIJAKAN UMUM BELANJA DAERAH**

Perwujudan pelayanan publik di Daerah tentunya berkorelasi erat dengan kebijakan belanja daerah. Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian Daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya Belanja Daerah dapat

menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Belanja Daerah merupakan seluruh Pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah. Program/kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor. Komponen yang mengindikasikan aktivitas dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Belanja Daerah. Komponen ini merupakan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja yang pengeluarannya disesuaikan dengan kemampuan dan potensi fiskal daerah. Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun depan.

Kebijakan umum belanja daerah yang akan diterapkan oleh Pemerintah Kota Jambi adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan melakukan penghematan di bidang belanja daerah sesuai dengan skala prioritas
- Memprioritaskan anggaran belanja bagi kegiatan yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat.
- Meningkatkan kualitas kelembagaan pengelola keuangan daerah dan penciptaan pedoman-pedoman serta peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah.

### 3.2.2. TARGET DAN REALISASI

Pada Tahun 2017 Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kota Jambi adalah sebesar Rp 1.671.160.550.942,00 yang terdiri dari Belanja Langsung Rp 930.751.073.304,00 dan Belanja Tidak Langsung Rp 740.409.477.638,00 Jika dibanding dengan jumlah anggaran Belanja tahun 2016 sebesar Rp 1.712.022.855.320,00 maka tahun 2017 ini Belanja Pemerintah Daerah Kota Jambi mengalami penurunan sebesar 2,39 %.

**Tabel 3.6.**  
**Komposisi Belanja Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2017**  
**(sebelum dilakukan audit BPK-RI)**

No.	Uraian	Anggaran Belanja	%
1.	Belanja Tidak Langsung	740.409.477.638,00	44,31
2.	Belanja Langsung	930.751.073.304,00	55,69
<b>TOTAL BELANJA</b>		1.671.160.550.942,00	100,00

Sumber : *Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2017*

Jika dilihat dari komposisinya, Belanja Tidak Langsung adalah sebesar 44,31 % dari total belanja Kota Jambi di Tahun 2017 dan sisanya sebesar 55,69 % merupakan Belanja Langsung.

**a. Belanja Tidak Langsung**

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung pada Tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp 740.409.477.638,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 633.807.862.665,00 atau 85,60 % (sebelum dilakukan audit BPK-RI) dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 3.7.**  
**Perincian Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kota Jambi**  
**Tahun Anggaran 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2017 (Setelah Perubahan)		
		Anggaran Belanja Tidak Langsung	Realisasi Belanja Tidak Langsung	%
1.	Belanja Pegawai	714.483.195.504,00	609.091.159.981,00	85,25
2.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0
3.	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0
4.	Belanja Hibah	18.809.345.000,00	18.623.738.650,00	99,01
5.	Belanja Bantuan Sosial	4.116.455.000,00	3.407.880.000,00	82,79
6.	Belanja Tidak Terduga	1.708.349.734,00	1.392.951.634,00	81,53
7.	Belanja Bantuan Keuangan	1.292.132.400,00	1.292.132.400,00	100,00
<b>TOTAL BELANJA</b>		740.409.477.638,00	633.807.862.665,00	85,60

Sumber : *Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2017*

## b. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Belanja Langsung pada Tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp 930.751.073.304,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 796.711.675.840,00 atau 85,60 %, sebelum dilakukan audit oleh BPK- RI. Belanja ini merupakan belanja yang dianggarkan terkait dengan program dan kegiatan berdasarkan sumber dari APBD Kota Jambi, APBD Provinsi Jambi, dan APBN Pemerintah. Adapun perincian Belanja Langsung pada T.A. 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.8.**  
**Perincian Belanja Langsung Pemerintah Kota Jambi**  
**Tahun Anggaran 2017 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)**

No	Uraian	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
1.	Belanja Pegawai	80.827.491.508,00	57.999.936.579,00	71,76
2.	Belanja Barang dan Jasa	412.298.506.482,00	333.621.690.687,50	80,92
3.	Belanja Modal	437.625.075.314,00	405.090.048.573,50	92,57
<b>TOTAL BELANJA</b>		<b>930.751.073.304,00</b>	<b>796.711.675.840,00</b>	<b>85,60</b>

Sumber : *Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2017*

Untuk informasi lebih lanjut tentang realisasi Belanja Daerah Tahun 2017 masih menunggu proses audit pihak BPK, yang bila telah selesai akan disampaikan secara lebih rinci didalam Nota Keuangan APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2017.

### 3.2.3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

#### a. Permasalahan

- Penyampaian laporan keuangan baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung oleh SKPD sering sangat terlambat dan menghambat proses pengelolaan keuangan daerah.
- Rentang waktu pelaksanaan APBD menjadi singkat karena lambatnya proses penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran.
- Kurangnya Pemahaman Pengelola Administrasi keuangan SKPD dalam mengelola administrasi dan pelaporan keuangan.

## b. Solusi

- Melaksanakan sosialisasi mengenai penatausahaan keuangan daerah.
- Memantapkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMKADA)
- Sinergi antar sistem pengelolaan keuangan seperti SIMDA dan SIPKD

### 3.2.4. RENCANA DAN REALISASI PEMBIAYAAN

Otonomi daerah yang bergulir dan berlaku efektif mulai Tahun 2001 telah memberi ruang kepada Pemerintah Daerah untuk menerapkan model penganggaran yang tidak hanya berpijak pada model anggaran berimbang saja. Pemerintah Daerah bisa menggunakan model penganggaran lain, yaitu anggaran surplus dan anggaran defisit dalam APBD

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Struktur APBD memperlihatkan bahwa komponen pembiayaan merupakan komponen yang dipergunakan untuk mengantisipasi surplus/(defisit) anggaran. Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah. Kebijakan pembiayaan daerah didasari oleh pandangan bahwa setiap kewajiban yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, secara konsisten dapat dilaksanakan sesuai tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab yang diemban, serta guna menjaga kredibilitas Pemerintah Daerah.

Berkenaan dengan kebijakan pembiayaan daerah Pemerintah Kota Jambi, maka penetapan kebijakan pembiayaan daerah dibarengi pula dengan optimalisasi kemampuan Pemerintah Kota Jambi dalam menyeimbangkan antara pos penerimaan dan pos pengeluaran daerah pada komponen pembiayaan sesuai dengan Kebijakan Umum APBD Pemerintah Kota Jambi yang telah ditetapkan.

Berikut ini merupakan rincian Pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kota Jambi :

**Tabel 3.9.**  
**Komposisi Pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2017**  
**(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)**

No	Uraian	Target	Realisasi	%
1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	133.974.290.815,00	133.974.290.815,00	100,00
2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7.181.148.042,00	7.000.000.000,00	97,48

Sumber : *Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2017*

**a. Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Besarnya Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam pembiayaan, dianggarkan sebesar Rp 133.974.290.815,00 dan realisasi Rp 133.974.290.815,00 atau 100% (sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI). Adapun perincian anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 3.10.**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2017 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)**

Uraian	Target	Realisasi	%
Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya (dari Belanja barang dan jasa)	133.974.290.815,00	133.974.290.815,00	100,00

*Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2017*

**b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Sedangkan untuk Pengeluaran Daerah dalam pembiayaan, dianggarkan sebesar Rp 7.181.148.042,00 dan realisasi Rp 7.000.000.000,00 atau 97,48 % (sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI). Adapun perincian anggaran dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 3.11.**  
**Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2017 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)**

Uraian	Target	Realisasi	%
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00
Pembayaran Pokok Utang	181.148.042,00	181.148.042,00	100,00

*Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2017*



## BAB IV

### PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

#### **4.1. URUSAN WAJIB**

##### **4.1.1. PENDIDIKAN**

Guna meningkatkan pelayanan pendidikan secara profesional, Dinas Pendidikan Kota Jambi telah menyusun rencana pembangunan bidang pendidikan yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Jambi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Jambi tahun 2013-2018, yaitu dalam rangka “Mewujudkan Masyarakat Kota Jambi Yang Berakhlak, Berbudaya, dan Berdaya Saing” dengan Misi “Meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat Kota Jambi melalui pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata”.

Selain itu, Renstra Dinas Pendidikan disusun dengan mengacu kepada Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang memiliki Visi; “Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan dan Kebudayaan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia yang Cerdas dan Berkarakter Kuat”, dengan misi sebagai berikut: 1). Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan dan kebudayaan; 2). Memperluas keterjangkauan layanan pendidikan dan kebudayaan; 3). Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kebudayaan; 4). Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan dan kebudayaan; 5). Menjamin kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan; dan 6). Melestarikan dan memperkuat Bahasa dan Kebudayaan Indonesia.

Sebagaimana kebijakan pemerintah Kota Jambi yang ingin mewujudkan sumber daya manusia Kota Jambi yang produktif dan berdaya saing” maka, melalui program Tiga Tahun Kota Jambi Bangkit, untuk bidang pendidikan pemerintah Kota Jambi telah meluncurkan program sekolah bebas pungutan dan pemberian beasiswa bagi semua siswa miskin, serta kegiatan pengadaan pakaian seragam dan peralatan sekolah dari tingkat SD sampai SMP bagi siswa kurang mampu yaitu di dua puluh empat satuan pendidikan di Sekolah Swasta di Kota Jambi serta pemberian bantuan SPP kepada semua siswa miskin dari tingkat SD sampai SMA/SMK. Melalui program ini diharapkan tidak ada lagi putra-putri daerah Kota Jambi yang tidak mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik dan layak.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi untuk urusan pendidikan adalah sebesar Rp. 528.881.703.660,00 terdiri dari:

Belanja Tidak Langsung sebesar	Rp. 409.469.537.660,00
Belanja Langsung sebesar	<u>Rp. 119.412.166.000,00</u>
Jumlah	Rp. 528.881.703.660,00

Jika dibandingkan dengan Total Belanja APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar Rp. 1.671.160.550.942,00 maka persentase anggaran untuk belanja fungsi pendidikan adalah sebesar 31,71 persen. Angka ini telah memenuhi persentase minimal yang ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pasal 2, ayat (1) bahwa alokasi anggaran belanja fungsi pendidikan ditetapkan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen).

Dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN/APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pasal 2, ayat (1) bahwa Alokasi anggaran belanja fungsi pendidikan ditetapkan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen). Selanjutnya ayat (2) disebutkan bahwa alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara anggaran belanja fungsi pendidikan terhadap seluruh belanja APBD. Pasal 3 disebutkan bahwa alokasi belanja fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi belanja modal, belanja barang, belanja pegawai, belanja bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja hibah. Pasal 6 menyatakan belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan struktural, tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru, dan tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru.

Pada tahun anggaran 2017, anggaran Dinas Pendidikan Kota Jambi yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung untuk membiayai program dan kegiatan urusan pendidikan yang telah dilaksanakan baik untuk peningkatan sarana/prasarana maupun peningkatan mutu, yaitu; Program pelayanan administrasi perkantoran dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.818.998.100,00 terealisasi Rp. 3.317.740.173,00 (86,87%), Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.874.205.500,00 terealisasi Rp. 2.765.422.800,00 (96,22%), Program peningkatan disiplin aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 873.000.000,00 terealisasi Rp. 862.903.000,00 (98,84%), Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 283.780.000,00 terealisasi Rp. 223.380.000,00 (78,72%), Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.521.000,00 terealisasi Rp. 30.421.000,00 (99,67%), Program Perencanaan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00 terealisasi Rp. 30.000.000,00 (100%), Program Pengembangan Data/Informasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 344.599.000,00 terealisasi Rp. 338.459.000,00 (98,22%), Program Peningkatan Akses, Mutu dan Tata Kelola Pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 111.157.062.400,00 terealisasi Rp. 99.527.152.747,00 (89,54%).

Sesuai dengan target RPJMD Kota Jambi pada bidang pendidikan, indikator kinerja Utama Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada usia sekolah pada tahun 2017 ditargetkan 83,54%, terealisasi 117,78%. Indikator kinerja utama Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) pada tahun 2017 ditargetkan 11,25%, sampai saat ini belum dapat diketahui realisasinya dikarenakan data BPS belum dipublikasikan. Indikator kinerja utama jumlah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi pada tahun 2017 ditargetkan 94,57%, terealisasi sebesar 96,11%. Indikator kinerja utama jumlah sekolah sesuai SNP pada semua jenjang pendidikan pada tahun 2017 ditargetkan 80,00%, terealisasi sebesar 101,25%.

Permasalahan yang dihadapi didalam pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan pada umumnya tidak terlalu signifikan sehingga dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran pembangunan pendidikan antara lain adalah keterbatasan waktu dan lokasi sekolah yang akan dilaksanakan sebagian besar berada pada daerah dengan topografi yang berada di atas rawa.

Adapun prestasi yang dicapai oleh Dinas Pendidikan Kota Jambi pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel: 4.1  
**PENGHARGAAN BIDANG PENDIDIKAN  
 YANG DITERIMA PEMERINTAH KOTA JAMBI  
 SERTA PRESTASI GURU, SISWA, DAN KEPALA SEKOLAH DI TINGKAT NASIONAL  
 JENJANG SD DAN SMP TAHUN 2017**

NO	NAMA PENGHARGAAN	PENYELENGGARA	YANG MEMBERI PENGHARGAAN
1.	Kihajar Award	Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan	Mentri Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Nama	Peringkat	Asal Sekolah/Lembaga	Jenis Lomba
1	2	3	4	5
<u>Prestasi Siswa SD</u>				
1	Jonathan Amadio Tanli	Juara I	SD Stella Maris School	Olimpiade Matematika
2	Axel Keefi Beltsazar	Juara I	SDS Xaverius 2	International Gymnastics Invitation Mag Level 3 Open
3	Kelvin Areinda Nathanael	Juara I	SDS Xaverius 2	International Gymnastics Invitation Place WAG Level (8Y & Under)
4	Rehulina Sembiring	Juara I	SDS Xaverius 2	International Gymnastics Invitation Place WAG FIG Junior (10-12)
5	Nayla Grigita Putri	Juara I	SDN 74/IV	International Gymnastics Invitation Place Level 3 (10 Y)
6	Rafi Al Fajri	Juara I	SDN 9/IV	International Gymnastics Invitation Place Level 2 (10 Y & above)
7	Raja Putra Raynaldi	Juara I	SDN 59/IV	International Gymnastics Invitation Place Level 1 (8 Y & Under)
8	Muhammad Shahan Shah	Juara I	SDN 59/IV	International Gymnastics Invitation (8Y & Under)
9	Nanda Yolani Pratiwi	Juara I	SDN 140/IV	International Gymnastics Invitation Putri (10Y & Under)
10	AS. Sugiarto	Juara I	SDN 132/IV	International Gymnastics Invitation Putra (10Y & Under)
11	Chrisdanmark Hutauruk	Juara I	SDS Kristen Bina Kasih	International Gymnastics Invitation Putra (9Y & Under)
12	Theresia Bianca Xaviera Niti	Juara II	SDS Kristen Bina Kasih	Olimpiade Matematika
13	Risqika Naila Ihsani	Juara II	SD Islam Al Falah	Membaca Cerita Rakyat Bagi Siswa SD
14	M. Athar Anindya Bassar	Juara II	SD Islam Al Falah	Taekwondo Bharaduta Open 2017
15	Keyza Fajar Azzaky	Juara II	SD Islam Al Falah	International Gymnastics Invitation Place MAG Level 2 (9Y & Under)
16	Axel Keefi Beltsazar	Juara II	SDS Xaverius 2	International Gymnastics Invitation Vaulting Table
17	Axel Keefi Beltsazar	Juara II	SDS Xaverius 2	Kuda Kelana /Jamur Artistik Putra Katagori II
18	Axel Keefi Beltsazar	Juara II	SDS Xaverius 2	Palang Sejajar Arstistik Putra Kategori II
19	Eunike Felice	Juara II	SDS Xaverius 2	International Gymnastics Invitation Place WAG NDP Level 2
20	Rasthy Syalom	Juara II	SDS Xaverius 2	International Gymnastics Invitation Place WAG Level 2
21	Marcello Brean Yoeltra Ginting	Juara II	SDS Xaverius 1	OSN Bidang IPA
22	Aurelia Syasyabila Putri	Juara II	SDN 59/IV	Senam No. Ritmik Putri-Tali
23	Lusia Elshany Larunia	Juara II	SDS Unggul Sakti	International Gymnastics Invitation (9Y & Under)
24	Audrey Charleta	Juara II	SDS Kanaan Global School	American Mathematics Olimpiad (AMO)
25	Evelline Huang	Juara II	SDS Kanaan Global School	American Mathematics Olimpiad (AMO)
26	Jesslyn Philotra	Juara II	SDS Kanaan Global School	American Mathematics Olimpiad (AMO)
27	Axel Keefi Beltsazar	Juara III	SDS Xaverius 2	International Gymnastics Invitation Pommel Horse
28	Bima Arsy	Juara III	SDN 59/IV	Taekwondo Bharaduta Open 2017
29	Vincent Fernando	Juara III	SDS Kanaan Global School	American Mathematics Olimpiad (AMO)
30	Derric Davin Lim	Juara III	SDS Kanaan Global School	American Mathematics Olimpiad (AMO)
31	Joel Franklin Gunawan	Juara III	SDS Kanaan Global School	American Mathematics Olimpiad (AMO)
32	Romoe Ethan Tio	Juara III	SDS Kanaan Global School	American Mathematics Olimpiad (AMO)
33	Kevin Fernando	Juara III	SDS Kanaan Global School	American Mathematics Olimpiad (AMO)
34	Vireelle Lee Yuan	Juara III	SDS Kanaan Global School	American Mathematics Olimpiad (AMO)
35	Peter Samuel Lim	Juara III	SDS Kanaan Global School	American Mathematics Olimpiad (AMO)
<u>Prestasi Guru SD</u>				
36	Okta Moroza	Juara I	SD Islam Al Falah	Mengajar Berbahasa Indonesia Bagi Guru SD
<u>Prestasi Kepala Sekolah SD</u>				
37	Witzir Sumadisastru, S. Ag	Juara II	SDIT Nurul Ilmi	Lomba Budaya Mutu Sekolah Dasar
38	Rauda Hanim, S.Pdl	Juara III	SDN 85/IV	Lomba Budaya Mutu Sekolah Dasar

No.	Nama	Peringkat	Asal Sekolah/Lembaga	Jenis Lomba
1	2	3	4	5
<u>Prestasi Siswa/ SMP</u>				
1.	Yogi Saputra Aprianto	Juara 1	SMPN 11 Kota Jambi	Lomba Kejuaraan Bharaduta Open Taekwondo 2017
2.	Billy Clinton	Juara 1	SMPN 11 Kota Jambi	Lomba Kejuaraan Bharaduta Open Taekwondo 2017
3.	Clayton Fernalo	Juara 1	SMP Kanaan Global School Kota Jambi	American Mathematics Olympiad (AMO)
4.	Inez Arini Putri	Juara 1	SMPN 1 Kota Jambi	The 13th AU Taekwondo Championship Cup
5.	M. Jordan Satria	Juara 1	SMPN 7 Kota Jambi	Lomba Kejuaraan Bharaduta Open Taekwondo 2017
6.	Lois Fragrance	Juara 1	SMP Kristen Bina Kasih Kota Jambi	International Gymnastics Invitation 2017 umur (13-15y) juara 3 place Wag Fig Junior
7.	Andrew Dwi Saputra	Juara 1	SMPN 5 Kota Jambi	International Gymnastics Invitation 2017 umur (11-13y) juara 1 place Place Mag Fig Junior
8.	Clara Maretha	Juara 2	SMPN 11 Kota Jambi	2nd Malaysia Open Taekwondo Championship 2017
9.	Nantigiri Kemala Yudha	Juara 2	SMPN 11 Kota Jambi	2nd Malaysia Open Taekwondo Championship 2017
10.	M. Ilhamsyah, R	Juara 2	SMPN 11 Kota Jambi	Lomba Kejuaraan Bharaduta Open Taekwondo 2017
11.	Bryan Atiesta Kiely	Juara 2	SMP Kanaan Global School Kota Jambi	American Mathematics Olympiad (AMO)
12.	Clayton Fernalo	Juara 2	SMP Kanaan Global School Kota Jambi	International Junior Math Olympiad (UMO) 2017 di Kamboja
13.	Clayton Fernalo	Juara 2	SMP Kanaan Global School Kota Jambi	International Junior Math Olympiad UMO) 2017 di Vietnam
14.	Maitri Taslim	Juara 2	SMP Kanaan Global School Kota Jambi	American Mathematics Olympiad (AMO)
15.	Raymond David Kartipala Bukit	Juara 2	SMPN 1 Kota Jambi	Lomba Karya Tulis Siswa SMP Tahun 2017
16.	Zairiliana Mayanti	Juara 2	SMPN 5 Kota Jambi	Kejuaraan Nasional Senam antar PPLP tahun 2017 cabang palang bertingkat artistik putri Kategori I
17.	Andrew Dwi Saputra	Juara 2	SMPN 5 Kota Jambi	International Gymnastics Invitation 2017 umur (11-13y) juara 1 place Place Mag Fig Junior
18.	M. Iqbal Al Farid	Juara 2	SMPN 5 Kota Jambi	Lomba Angkat Besi Kelas 38 Kg Pre Youth Perak Snacth
19.	Renaldo Afri	Juara 2	SMPN 5 Kota Jambi	Lomba Kejuaraan Bharaduta Open Taekwondo 2017
20.	Aura Filzani Fitri L	Juara 2	SMPN 11 Kota Jambi	Juara II -800 M Gaya Bebas PI Kejurnas Renang Kelompok Umur 2017
21.	Vita Winata	Juara 3	SMP Kanaan Global School Kota Jambi	American Mathematics Olympiad (AMO)
22.	Reynaldo Putra Santosa	Juara 3	SMP Kanaan Global School Kota Jambi	World Mathematics Invitation (WMI) 2017 di Vietnam
23.	M. Nur Irfan Iskandar	Juara 3	SMPN 7 Kota Jambi	Lomba Kejuaraan Bharaduta Open Taekwondo 2017
24.	Zairiliana Mayanti	Juara 3	SMPN 5 Kota Jambi	Kejuaraan Nasional Senam Artistik Junior dan Senior Balok Keseimbangan
25.	Zairiliana Mayanti	Juara 3	SMPN 5 Kota Jambi	International Gymnastics Invitation 2017 umur (10-12y) juara 3 place Team Winner Wag Fig Junior
26.	Lois Fragrance	Juara 3	SMP Kristen Bina Kasih Kota Jambi	Kejuaraan Nasional Senam antar PPLP tahun 2017, Juara 3 Balok Keseimbangan Artistik Putri Kategori II
27.	Lois Fragrance	Juara 3	SMP Kristen Bina Kasih Kota Jambi	International Gymnastics Invitation 2017 umur (13-15y) juara 3 place Team Winner Wag Fig Junior
28.	Lois Fragrance	Juara 3	SMP Kristen Bina Kasih Kota Jambi	Kejuaraan Nasional Senam antar PPLP tahun 2017, Juara 3 Beregu Putri Artistik Putri Kategori II
29.	Lidia Gustiana Tjinta	Juara 3		International Gymnastics Invitation 2017 umur (13-15y) juara 3 place Team Winner Wag Fig Junior
30.	Shalma Humaimah Zayyan	Juara 3	SMPN 5 Kota Jambi	Kejuaraan Nasional Senam antar PPLP tahun 2017 cabang Beregu Putri Artistik Putri Kategori II
31.	Shalma Humaimah Zayyan	Juara 3	SMPN 5 Kota Jambi	International Gymnastics Invitation 2017 umur (13-15y) juara 3 place Team Winner Wag Fig Junior
32.	Andrew Dwi Saputra	Juara 3	SMPN 5 Kota Jambi	Kejuaraan Nasional Senam antar PPLP tahun 2017 cabang Beregu Putra Kategori II
33.	Aura Filzani Fitri L	Juara 3	SMPN 11 Kota Jambi	Juara II -400 M gaya Bebas PI Kejurnas Renang Kelompok Umur 2017
<u>Prestasi Guru SMP</u>				
34.	Rubiaty, M.Pd	Juara 1	SMPN 7 Kota Jambi	Pemakalah Terbaik pada kegiatan seminar Nasional Guru Pendidikan Dasar Berprestasi Tahun 2017

#### 4.1.2. KESEHATAN

Urusan Kesehatan merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi dan RSUD H. Abdul Manap. Kesehatan merupakan hak dasar yang wajib diterima oleh setiap manusia. Tanpa adanya taraf kesehatan yang layak dan baik diterima oleh masyarakat, sasaran dan tujuan pembangunan tidak akan dapat tercapai dengan baik. Dapat dikatakan bahwa, sukses atau tidaknya pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh baiknya kualitas kesehatan bangsa tersebut. Kualitas kesehatan masyarakat suatu bangsa merupakan tanggung jawab semua komponen masyarakat, baik itu dari sisi masyarakat, pemerintah dan *stakeholders*. Seluruh komponen tersebut harus secara bersama dan bersinergi bekerja sama membangun kualitas kesehatan masyarakat.

Pemerintah Kota Jambi melalui visi dan misi Walikota Jambi, telah menetapkan misi “Mewujudkan masyarakat kota yang berakhlak, berbudaya dan berdaya saing”. Melalui misi tersebut, ditetapkan tujuan “peningkatan pelayanan kesehatan dan revitalisasi infrastruktur kesehatan”. Sasaran dari tujuan ini adalah, tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat untuk semua. Adapun strategi yang diterapkan untuk mewujudkan misi ini adalah, dengan peningkatan mutu dan akses kesehatan. Dengan adanya strategi tersebut, arah kebijakan yang ditempuh adalah dengan meningkatkan mutu tenaga medis dan paramedis, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, dan meningkatkan pelayanan kesehatan. Keseluruhan langkah strategis ini dicapai untuk mewujudkan Kota Jambi Bangkit Tahun 2017.

Pembangunan Kesehatan Kota Jambi Tahun 2017 diarahkan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat yang memberikan prioritas pada upaya kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi sejak dalam kandungan sampai usia lanjut. Selain itu pembangunan bidang kesehatan Kota Jambi diarahkan untuk meningkatkan dan memelihara mutu pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Sementara itu, kehadiran sebuah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) bagi masyarakat Kota Jambi sangatlah dibutuhkan. Selain biaya pelayanan kesehatan yang terjangkau, fasilitas dan peralatan yang lengkap, dan kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor penting bagi keberhasilan sebuah Rumah Sakit. Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang

bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi memberikan pelayanan kesehatan tanpa membedakan tingkat sosial masyarakat. RSUD H. Abdul Manap melayani pasien umum, pasien pengguna kartu Jamkesmas, Jamkesmasda, Askes/BPJS, Jamsostek, dan Trimitra.

Pada tahun 2017, total anggaran belanja daerah untuk urusan kesehatan dalam APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 169.621.523.686,00 terdiri dari:

• Belanja/ Langsung Dinas Kesehatan Kota Jambi	Rp. 85.487.625.228,00
• Belanja Langsung RSUD. H. Abdul Manap	<u>Rp. 84.133.898.458,00</u>
Jumlah	Rp. 169.621.523.686,00

Dinas Kesehatan Kota Jambi pada tahun anggaran 2017 menganggarkan belanja langsung untuk 7 (tujuh) program dan 44 (empat puluh empat) kegiatan yang telah dilaksanakan baik pembangunan fisik maupun non fisik. Realisasi keuangan untuk penyerapan anggaran belanja langsung Dinas Kesehatan Kota Jambi pada tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 67.190.437.993,00 (78,60%) dari total target anggaran TA 2017 sebesar Rp. 85.487.625.228,00 Sesuai dengan target RPJMD Kota Jambi pada bidang kesehatan, pada tahun 2017 terealisasi target 100%, 5 unit jumlah puskesmas dengan pelayanan 24 jam. Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi dalam pelaksanaan urusan wajib di bidang kesehatan antara lain, penyusunan program dan penganggaran Dinas Kesehatan Kota Jambi Tahun 2017, belum mengacu pada penetapan indikator pencapaian 17 (tujuh belas) Sasaran *Grand Strategy* Departemen Kesehatan Republik Indonesia, melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 457/2008, dan disesuaikan pula dengan visi Pemda Kota yaitu "Terwujudnya Kota Jambi Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya". Hasil kegiatan program pembangunan kesehatan yang melalui anggaran keuangan tahunan daerah masih belum mengacu pada SPM Kesehatan dengan mempedomani Peraturan Menkes RI Nomor 741/2008 dan yang terakhir, masih ada kegiatan yang tidak dapat teralisasi 100% dikarenakan karena adanya keterlambatan dalam Penetapan Petunjuk Pelaksanaan kegiatan.

Prestasi yang didapat Dinas Kesehatan Kota Jambi pada tahun 2017 antara lain Penghargaan Kota Sehat Tingkat PADAPA di tingkat Nasional, Juara I Lomba Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas (kategori Tenaga farmasi) Tingkat Provinsi, Juara II Lomba Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas (kategori tenaga gizi) Tingkat

Provinsi, Juara II Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas (kategori Tenaga Kesmas) Tingkat Provinsi, Juara II Lomba Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas (kategori Dokter Gigi) Tingkat Provinsi. Juara III Lomba Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas (kategori Tenaga Ahli Lab Medik) Tingkat Provinsi, Juara III Lomba Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas (kategori Bidan) Tingkat Provinsi, Juara III Lomba Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas (kategori Tenaga Kesehatan Lingkungan) Tingkat Provinsi.

RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi pada tahun anggaran 2017 mengalokasikan belanja langsung untuk melaksanakan 33 kegiatan dalam 7 program untuk memenuhi 5 sasaran strategis. Realisasi keuangan untuk penyerapan anggaran belanja langsung RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi pada tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 75.516.201.344,00 (93,93%) dari total target anggaran 2017 sebesar Rp. 84.133.898.458,00.

Permasalahan yang dihadapi oleh RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi dalam pelaksanaan urusan wajib di bidang kesehatan adalah masih banyak program dan kegiatan yang belum mencapai target yang diinginkan sehingga masih banyak pembenahan bagi pihak rumah sakit untuk lebih meningkatkan kinerja dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan di rumah sakit dengan melengkapi peralatan kesehatan, pembenahan ruang dan gedung serta penampilan rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan lebih maksimal. Adapun prestasi yang didapat RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi pada tahun 2017 adalah sebagai motivator Rumah Sakit Sayang Ibu dan Anak (tingkat Provinsi Jambi).

#### 4.1.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan urusan wajib yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi. Pada tahun 2017 urusan pekerjaan umum sendiri dijabarkan dalam 4 (empat) program dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Pemukiman Berbasis Kawasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.478.060.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 8.255.791.000,00 atau sebesar 97,38%.
2. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 133.684.524.075,00 telah terealisasi sebesar Rp. 131.486.130.591,00 atau sebesar 98,36%.



3. Program Pembangunan Pemeliharaan dan Perluasan Utilitas Perkotaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 131.604.161.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 125.199.039.440,00 atau sebesar 95,13%.
4. Program Pembangunan, Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.351.107.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 19.935.530.050,00 atau sebesar 97,96%.

Sejalan dengan itu, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-2018 pada Urusan Pekerjaan Umum dijabarkan dalam misi 1 (satu) yaitu membangun infrastruktur perkotaan yang merata dan berwawasan lingkungan. Dengan indikator kinerja daerah meningkatkan Rasio panjang jaringan jalan dan drainase yang baik serta penurunan luas kawasan kumuh yang bertujuan dengan tujuan untuk meningkatkan dan mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkualitas. Pada tahun 2016 urusan pekerjaan umum memiliki target harus dicapai dalam RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, yaitu:

1. Target rasio panjang jaringan jalan yang baik sebesar 100 % atau sepanjang 510,452km dari total panjang jalan Kota Jambi 510,452 km pada tahun 2017 telah mencapai 92,00% atau sepanjang 496,616 km.
2. Target rasio panjang drainase dalam kondisi baik sebesar 90,00% atau sepanjang 114,48 km dari total panjang drainase Kota Jambi 127,2 km dan terealisasi sebesar sesuai target 90,00% atau sepanjang 114,48 km.
3. Target cakupan pelayanan air minum di Kota Jambi sebesar 80,00% dari total potensi SR yang ada di Kota Jambi dan terealisasi sebesar 75,00% dengan total SR 72.965.

Secara umum urusan pekerjaan umum dinilai cukup baik meskipun masih terdapat capaian target indikator kinerja daerah yang belum mencapai target mengingat keterbatasan alokasi anggaran ada pada tahun 2017. Namun demikian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dinilai perlu meningkatkan kinerjanya agar penanganan infrastruktur agar lebih fokus mengejar capaian target yang ditetapkan.

#### 4.1.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yang dijabarkan dalam 3 (tiga) program dan 16 (enam belas) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 34.873.749.500,00 dan terealisasi keuangan sebesar Rp. 33.461.316.882,00 atau sebesar 95,95% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-2018 pada Urusan Perumahan dijabarkan dalam misi 1 yaitu membangun infrastruktur perkotaan yang merata dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk meningkatkan dan mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas cakupan pelayanan infrastruktur dasar antara lain kecukupan lampu penerangan jalan umum dan lampu taman serta pengurangan Kawasan Kumuh.

Pada tahun 2017 urusan wajib perumahan memiliki target harus dicapai dalam RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, yaitu:

1. Rasio luas kawasan kumuh per luas wilayah sebesar 0,50% atau 344,55 Ha dari total luas kawasan kumuh Kota Jambi seluas 689,1 Ha dan terealisasi sebesar 0,66% atau seluas 4,55 Ha, pada tahun 2017 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga menyusun beberapa dokumen perencanaan penanganan kawasan kumuh Kota Jambi dengan luasan berdasarkan kewenangan untuk ditangani menggunakan dana APBN maupun APBD Kota Jambi berdasarkan dengan Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 700 Tahun 2014;
2. Kecukupan lampu penerangan jalan umum dan lampu taman sebesar 89.92% atau sebanyak 15.391 titik dan terrealisasi sebesar 80.20% atau sebanyak 13.727 titik dari total kebutuhan selama 5 tahun sebanyak 17.116 titik, hal ini jauh dari target capaian karena Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman fokus pada penambahan pemasangan lampu LED sebanyak 652 titik pada Jalan Arteri dan 507 titik pada Jalan-jalan lingkungan, selain itu juga dilakukan pemasangan lampu High Mesh sebanyak 38 titik.

Urusan perumahan secara kelembagaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni, pada Tahun 2017 Pemerintah Kota Jambi mendapat Program Pengurangan Kawasan Kumuh melalui SNVT Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) pada 1 (satu) Lokasi yaitu: Kelurahan Beringin. Selain dari itu terdapat Program Rumah Tidak Layak Huni melalui SNVT Penyediaan Perumahan Prov. Jambi dimana untuk Kota Jambi mendapat bantuan sebanyak 232 unit rumah tersebar pada 8 (delapan) Kelurahan di Kota Jambi, dengan nilai bantuan dari Rp. 15.000.000,- dan di tahun 2018 Pengurangan Kawasan Kumuh yang ditangani melalui dana APBN melalui Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) pada 2 (dua Lokasi) yaitu Kelurahan Tanjung Pinang dan Kelurahan Beringin guna menuntaskan penanganan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 dan

2017. Untuk kegiatan pengurangan Rumah Tidak Layak Huni Kota Jambi mendapat bantuan sebanyak 257 unit rumah.

Dan untuk Tahun 2017 Pemerintah Kota Jambi juga mendapatkan Pembangunan Rumah Susun Sewa yang diperuntukan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah khusus Tenaga Medis yang dibangun pada Lokasi RSUD Abdul Manap Kota Jambi sebanyak 1 (satu) Tower yang terdiri dari 70 (tujuh puluh) unit type 36, melalui SNVT Penyediaan Perumahan.

#### 4.1.5. URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebagai bagian dari RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan “mewujudkan masyarakat kota yang berakhlak, berbudaya dan berdaya saing” yang merupakan Misi yang ke-3 dari RPJMD Kota Jambi guna mendukung Visi Kota Jambi yaitu “mewujudkan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis masyarakat yang berakhlak dan berbudaya. Urusan ini pada tahun 2017 dilaksanakan oleh 2 (dua) OPD, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Untuk melaksanakan misi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2017 memiliki 2 (dua) program urusan yang terbagi dalam 5 kegiatan.

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan urusan ini pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp. 6.097.576.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar 94,36 % atau Rp. 5.753.750.689,00 dan realisasi fisik sebesar 100 %. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut tidak ditemui permasalahan yang signifikan.

Sedangkan untuk OPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai misi memberikan pelayanan prima dalam bidang pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan korban bencana, Meningkatkan peran serta masyarakat, swasta dan instansi pemerintah dalam bidang pencegahan, penanggulangan, penyelamatan dan rekondisi korban bencana.

Strategi yang dilakukan adalah dengan cara melaksanakan koordinasi perizinan pembangunan gedung (IMB), Izin penggunaan bangunan dan Izin lokasi (Rekomendasi keruangan).

Dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana dan kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan didukung dengan:

- a. 1 (satu) unit Mako;

- b. 4 (empat) unit Posyankar yaitu Jambi Selatan, Jambi Timur, Kota Baru dan Danau Teluk;
- c. 4 (empat) unit Fire Truck kapasitas 10.000 liter;
- d. 4 (empat) unit Fire Truck Kapasitas 5.000 liter;
- e. 2 (dua) unit Fire Truck Kapasitas 4.000 liter;
- f. 2 (tiga) unit Fire Truck Kapasitas 3.000 liter;
- g. 1 (satu) unit Mobil Pompa;
- h. 1 (satu) unit Mobil Rescue;
- i. 1 (satu) unit Mobil Logistik;
- j. 1 (satu) unit Gerobak Motor Pemadam;
- k. 1 (satu) unit Mobil Pasukan;
- l. 1 (satu) unit Mobil Dapur Umum;
- k. 5 (lima) unit Perahu Karet;
- l. 137 (seratus tiga puluh tujuh) orang Satgas.

Dengan kondisi yang dimiliki pada tahun 2017 Dinas Damkar dan Penyelamatan masih memiliki respon time sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang penanggulangan kebakaran yaitu selama 15 menit dari pos terdekat menuju lokasi kebakaran.

#### 4.1.6. URUSAN SOSIAL

Urusan Sosial yang merupakan urusan wajib dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kota Jambi. Pada tahun 2017, total anggaran belanja langsung untuk urusan sosial adalah sebesar Rp. 4.056.370.000,00 dengan realisasi keuangan yang dapat direalisasikan dari belanja langsung urusan sosial tersebut adalah sebesar Rp. 3.925.883.484,00 atau sebesar 96,78 % untuk melaksanakan 7 Program dan 39 kegiatan.

Sesuai dengan target indikator kinerja urusan sosial pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-2018, dengan sasaran terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanganan PMKS, pada tahun 2017 ditargetkan indikator kinerja dengan rasio peningkatan jumlah PMKS yang dilayani per tahun sebesar 54% dari total target selama 5 tahun sebesar 7.543 PMKS. Realisasi yang diperoleh selama kurun waktu tahun 2017 adalah sebesar 70,00 % atau 10.317 PMKS. Angka tersebut menggambarkan bahwa, pada tahun 2017 realisasi indikator

kinerja yang ditargetkan pada RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018 melebihi dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2017.

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang signifikan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan sosial.

#### 4.1.7. URUSAN TENAGA KERJA

Urusan tenaga kerja merupakan urusan yang menjadi tanggung jawab dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi. Pada Tahun 2017, total anggaran belanja langsung untuk Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi dalam APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2017 untuk urusan Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp. 735.716.500,00 untuk melaksanakan 1 (satu) Program dan 2 (dua) Kegiatan. Realisasi keuangan yang dapat direalisasikan dari belanja langsung urusan ketenagakerjaan tersebut adalah sebesar Rp. 709.918.549,00 (96,49%).

Sesuai dengan target indikator kinerja urusan ketenagakerjaan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-2018, dengan sasaran terciptanya lapangan pekerjaan, pada tahun 2017 ditargetkan indikator kinerja jumlah pencari kerja terdaftar yang terserap sebesar 20% dari total target selama 5 tahun sebesar 5.431 pencari kerja. Realisasi yang diperoleh selama kurun waktu tahun 2017 adalah sebesar 49,19% atau 2.703 orang. Angka tersebut menggambarkan bahwa, pada tahun 2017 realisasi indikator kinerja yang ditargetkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018 melebihi dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2017.

Sasaran kedua adalah tersedianya tenaga kerja lokal yang berdaya saing, pada tahun 2017 ditargetkan indikator kinerja jumlah serapan tenaga kerja pada UMKM sebesar 3,25% dari total target selama 5 tahun sebesar 13.986 tenaga kerja. Realisasi yang diperoleh selama kurun waktu tahun 2017 adalah sebesar 15,38% atau 2.703 tenaga kerja.

Angka tersebut menggambarkan bahwa pada tahun 2017 realisasi indikator kinerja yang ditargetkan pada RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018 melebihi dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2017.

Adapun hasil dan prestasi yang telah dicapai selama kurun waktu tahun 2017 adalah berhasil mempertahankan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2008 untuk kegiatan Pelayanan Penerbitan Kartu Pencari Kerja (AK 1) di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi dari Transpacific Certification Limited.

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang signifikan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi pada Tahun Anggaran 2017.

#### 4.1.8. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan tugas dan tanggung jawab dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi.

Adapun isu strategis yang berkaitan dengan masalah pokok di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Jambi adalah masih tingginya angka tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan terhadap anak, masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera, serta masih rendahnya persentase perempuan pada posisi eselon II dan III di lembaga pemerintahan. Tantangan tersebut harus ditangani secara efektif dan tepat sasaran dengan menetapkan program yang tepat pula.

Pemerintah Kota Jambi melalui visi dan misi Walikota Jambi, telah menetapkan misi “Mewujudkan masyarakat kota yang berakhlak, berbudaya dan berdaya saing”. Melalui misi tersebut, ditetapkan tujuan “peningkatan kesejahteraan keluarga dan pengarusutamaan gender di semua aspek pembangunan”. Sasaran dari tujuan ini adalah terwujudnya peningkatan peran serta perempuan dalam pemerintahan. Adapun strategi yang diterapkan untuk mewujudkan misi ini adalah, dengan upaya peningkatan peran perempuan di pemerintahan. Dengan adanya strategi tersebut, arah kebijakan yang ditempuh adalah dengan meningkatkan porsi perempuan dalam jabatan pemerintahan. Keseluruhan langkah strategis ini dicapai untuk mewujudkan Kota Jambi Bangkit Tahun 2017.

Pada tahun 2017, total anggaran belanja langsung daerah yang dialokasikan untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dalam APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 10.651.421.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 10.596.287.190,00 (99,48%).

Adapun pencapaian dan hasil yang telah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, sesuai dengan pencapaian target Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD Kota Jambi yang dicapai selama kurun waktu tahun 2017 adalah sebagai berikut berdasarkan data kurun waktu 2017 jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak-anak mencapai 67 kasus dan jumlah pengaduan yang terselesaikan sebanyak 67 kasus atau 100%.

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang signifikan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan urusan pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi pada tahun anggaran 2017.

#### 4.1.9. URUSAN PANGAN

Urusan Pangan merupakan prioritas Pembangunan Daerah Kota Jambi yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi, konsumsi pangan dan percepatan diversifikasi pangan sesuai dengan karakteristik daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat petani. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi sebagai pelaksana urusan pangan dan urusan pertanian berupaya melaksanakan program untuk mencapai tujuan ketahanan pangan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha sektor pertanian (pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan).

Dalam menyelenggarakan urusan pangan, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.031.190.000,00 yang dijabarkan pada 1 program dan 9 kegiatan. Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 1.856.133.900,00 atau 91,38% dan realisasi fisik kegiatan 100%.

Upaya pencapaian urusan pangan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi pada tahun 2017 antara lain:

1. Terlaksananya Gerakan makan bergizi berimbang, pengujian sampel produk pangan, pengadaan alat labor uji sampel prima 3 dan sosialisasi keamanan pangan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
2. Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan pekarangan dan pembentukan POKJA untuk penganekaragaman konsumsi pangan, yang dikarenakan masih rendahnya konsumsi pangan sumber karbohidrat selain beras, serta terlaksananya sosialisasi keamanan pangan.
3. Terlaksananya pembinaan desa mandiri pangan di 12 (dua belas) Kelurahan dalam Kota Jambi.
4. Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebanyak 15.000 Kg untuk lokasi pasca bencana alam dan keadaan darurat.
5. Terlaksananya penilaian kemampuan kelas kelompok tani, Pelatihan petani di BPP, terlaksananya rembug KTNA dan terlaksananya peringatan HKP/PEDA, serta penyuluh dan pendamping bagi pertanian/perkebunan.

Re-orientasi program strategis perlu dilakukan untuk mengedepankan urusan pangan menjadi prioritas pembangunan pertanian dan ketahanan pangan Kota Jambi ke

depan. Penekanan program strategis urusan pangan ke depan meliputi ketersediaan dan distribusi pangan, ketahanan pangan dan keamanan pangan.

#### 4.1.10. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya menjadi tanggung jawab berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga non pemerintah, pelaku usaha, masyarakat dan dunia pendidikan. Isu strategis lingkungan hidup merupakan perpaduan dari berbagai upaya yang berkenaan dengan dampak terhadap lingkungan akibat dari aktifitas penduduk dan pertumbuhan penduduk. Hal penting dalam pengelolaan lingkungan adalah upaya merespon isu strategis yang terdefinisi dan penjabaran peran masing-masing pemangku kepentingan, sehingga program dan kegiatan prioritas dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Dalam pengelolaan lingkungan tahapan perencanaan, implementasi dan monitoring evaluasi perlu dilakukan secara berkelanjutan, terukur dan akuntabel. Dokumentasi tiap tahapan pengelolaan lingkungan menjadi kebutuhan administrasi dan pertanggungjawaban publik, sekaligus perangkat evaluasi kebijakan program dan kegiatan. Melihat kondisi lingkungan hidup di kota Jambi secara umum sudah sangat memprihatinkan, sehingga sangat mendesak dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sesuai daya dukung dan daya tampung. Sebelumnya, program dan kegiatan berorientasi pada pengelolaan limbah padat, cair dan gas, yang berarti pengelolaan setelah timbulan limbah. Paradigma dan ketentuan yang berlaku mendorong Pemerintah Kota Jambi untuk berpikir lebih strategis pada pengurangan timbulan limbah, pengelolaan yang bernilai tambah, ekonomis dan ramah lingkungan. Oleh karenanya, maka pengelolaan lingkungan sudah menjadi urusan wajib dan berorientasi keberlanjutan sejak dari tahapan perencanaan, formulasi kebijakan, dan pelaksanaan kegiatan usaha, serta monitoring evaluasi melalui upaya mereduksi dampak lingkungan opsi pengelolaan lingkungan seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis, instrumen ekonomi lingkungan, *polluter must pay principle*, produksi bersih, ISO 14001, dan seterusnya.

Pada tahap rencana kegiatan maka Amdal,UKL/UPL merupakan instrumen yang harus dipenuhi dengan baik. AMDAL merupakan salah satu instrumen perlindungan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan. Tantangan yang di hadapi Dinas lingkungan Hidup Kota Jambi dalam 5 (lima) tahun ke depan untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai salah satu instansi pemerintah Daerah Kota Jambi antara lain:



1. Peningkatan jumlah penduduk yang mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih dan sanitasi yang sekaligus beresiko terhadap kelangsungan sumber daya alam dan daya tampung.
2. Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup kota akibat laju pembangunan yang meningkat, jumlah dan kepadatan penduduk yang semakin tinggi serta keterbatasan lahan.
3. Pencemaran lingkungan yang di akibatkan oleh aktivitas manusia dan ketidakpatuhan terhadap tata ruang dan instrumen lingkungan.

Salah satu target dalam RPJMD, dimana fungsi urusan terkait lingkungan hidup ini di laksanakan pada OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, yang diakomodir dalam 10 Program dan tersebar pada 32 kegiatan urusan lingkungan hidup pada tahun 2017. Dengan alokasi anggaran dana APBD sebesar Rp. 34.307.962.179,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 31.769.172.978,00 dengan bobot persentase serapan sebesar 92,60 %.

Pencapaian dalam program Pengendalian Kerusakan Lingkungan pada tahun 2017, berdasarkan target indikator kinerja daerah tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi adalah mencapai 100%. Pencapaian ini meliputi terbentuknya 47 kelompok bank sampah, terbentuknya 30 sekolah adiwiyata, 19 sekolah bank sampah, jumlah perusahaan atau industri yang mengikuti uji dan proper meningkat dan terdokumentasinya buku status dan basis data lingkungan hidup Kota Jambi.

Dan dalam target Indikator Kinerja Daerah untuk pelayanan pengujian kadar limbah padat dan cair pada tahun 2017, menunjukkan perbaikan layanan yang meliputi 96 kegiatan usaha, 23 titik sumber air dan 800 sampel limbah. Berkenaan dengan hal ini, target kinerja lainnya yakni penurunan beban pencemaran lingkungan sudah diupayakan melalui koordinasi yang lebih baik, kendati pada akhirnya terjadi penurunan kualitas air pada titik pantau kinerja lingkungan hidup di sub-das tembuku. Dengan capaian 100% kinerja daerah dalam pengawasan dan penegakan hukum lingkungan melalui koordinasi teknis baik dalam pemeriksaan, penilaian dampak maupun penyusunan dokumen lingkungan lainnya, diharapkan terjadi penurunan beban pencemaran lingkungan. Penurunan kualitas air yang disebabkan oleh pencemaran pada titik uji di sub-das tembuku dan asam, jauh dari target capaian pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Hal ini dikarenakan degradasi kualitas lingkungan tidak dapat diatasi pada tahap pelaksanaan dan pengawasan saja, akan tetapi juga pada tahap perencanaan dan mitigasinya. Dukungan perangkat daerah dan kewenangan lainnya dalam upaya pencapaian kualitas lingkungan hidup yang lebih baik sangat dibutuhkan. Demikian pula peran serta aktif masyarakat dalam menjaga

kualitas kawasan sempadan dan badan sungai juga berpengaruh konstruktif, dengan harapan dapat menekan angka pencemaran pada kedua sungai tersebut.

Adapun beberapa prestasi Pemerintah Kota Jambi tahun 2017 antara lain:

1. Penerima penghargaan sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2016 berdasarkan SK Gubernur Jambi Nomor: 810/KEP.GUB/DLH-2/2017, tanggal 20 Juli 2017.
2. Anugerah Piala Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK.356/Menlhk/Setjen/PLB.0/8/2017, tanggal 1 Agustus 2017.
3. Penetapan sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Jambi pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas berdasarkan SK Walikota Jambi Nomor: 459 Tahun 2017, tertanggal 5 Desember 2017.

#### 4.1.11. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dalam Penyelenggaraan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemerintah Kota Jambi yaitu Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi. Latar belakang yang menjadi isu strategis didirikannya OPD ini adalah masalah kependudukan yang saat ini menjadi isu yang mengglobal atau isu nasional, salah satu isu yang paling aktual adalah masalah tingginya kenaikan jumlah penduduk akibat pertumbuhan yang tidak terkendali demikian juga dengan meningkatnya Urbanisasi ke Kota Jambi. Tingginya pertumbuhan penduduk pada suatu Negara atau wilayah, membawa dampak yang beragam, baik dampak positif maupun masalah yang dapat kita sebut sebagai dampak negatif. Dampak positif dari tingginya pertumbuhan penduduk adalah, munculnya angka potensi sumber daya manusia produktif, yang dapat menjadi motor utama penggerak pembangunan suatu bangsa atau wilayah, tentu saja dengan manajemen pengelolaan kependudukan yang tepat, efektif dan efisien karena tersedianya tenaga kerja. Adapun dampak negatif dari tingginya pertumbuhan penduduk adalah masalah kerawanan sosial yang sistematis, dimulai dari tingginya angka kriminalitas, terbatasnya ketersediaan bahan pangan, terbatasnya lapangan pekerjaan, rendahnya standar kesehatan, anomali konflik dan masalah kerawanan lainnya termasuk perusakan lingkungan.

Oleh karena itu diperlukan langkah strategis yang tepat dan jitu dalam menangani masalah kependudukan pada suatu wilayah. Kota Jambi adalah salah satu kota sedang yang menuju kota besar sebagai ibukota propinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi positif paling pesat di Indonesia, saat ini menjadi magnet bagi mobilitas perpindahan

penduduk dari luar daerah kedalam Kota Jambi atau lazimnya dikenal dengan sebutan Urbanisasi. Potensi kerawanan sosial akibat pesatnya pertumbuhan penduduk pun menjadi salah satu isu strategis dalam merencanakan rencana strategis Kota Jambi.

Permasalahan dasar atau Isu strategis yang berkaitan dengan masalah dasar di bidang kependudukan di Kota Jambi adalah belum optimalnya pengelolaan data kependudukan dan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melengkapi administrasi kependudukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Tantangan tersebut harus ditangani secara efektif dan tepat sasaran dengan menetapkan program yang tepat pula. Pemerintah Kota Jambi melalui Visi dan Misi Walikota Jambi, telah menetapkan misi “Mewujudkan pemerintahan yang profesional dan bersih (*Clean governance*)”. Melalui misi tersebut, ditetapkan tujuan “Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*)”. Sasaran dari tujuan ini adalah, tercapainya pemerataan dan kualitas pelayanan publik. Adapun strategi yang diterapkan untuk mewujudkan misi ini adalah, dengan peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya strategi tersebut, arah kebijakan yang ditempuh adalah dengan menerapkan SOP dalam pelayanan publik.

Pada tahun 2017, total anggaran belanja daerah untuk urusan kependudukan dan catatan sipil yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dalam APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 6.098.193.000,00 untuk melaksanakan 28 kegiatan dalam 8 program. Realisasi keuangan untuk penyerapan anggaran belanja langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi pada tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 5.631.203.203,00 (92,34%) dari total target anggaran TA 2017 terdapat sisa dan efisiensi anggaran sebesar Rp. 466.989.797,00.

Untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan, telah dilakukan kerjasama dengan pihak kecamatan untuk melakukan rekam data dan *update* data penduduk sesuai ketentuan untuk mendapatkan NIK dan KK, dengan menempatkan tenaga khusus untuk pendataan secara digital. Capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2017, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP	299,371	301,113	301,122	308,077	348,022
2	Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah	401,560	411,483	418,231	438,234	581,230
3	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	72,857	73,639	74,241	78,811	94,961
4	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	259,092	263,684	266,605	273,263	336,393
5	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	299,371	301,113	301,122	308,077	348,022
6	Jumlah penduduk wajib KTP	401,560	411,483	418,731	438,234	581,230
7	Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan	4,803	9,191	9,116	8,327	8,287
8	Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan	10,596	10,004	9,887	9,017	8,935
9	Jumlah Penduduk	539,242	559,571	602,970	607,796	609,620
	- Laki-laki	273,490	283,832	306,151	309,089	309,456
	- Perempuan	265,752	275,739	296,819	298,707	300,164

Peningkatan jumlah penduduk disebabkan urbanisasi dan kematian bayi yang sudah dapat dikendalikan. Secara umum tidak terdapat permasalahan yang signifikan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan kependudukan dan catatan sipil yang menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi pada tahun anggaran 2017, hanya ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk kedepan antara lain:

1. Ketersediaan Blangko KTP - el.
2. Masih terdapatnya penduduk yang merekam data lebih dari 1 (satu) kali dan berdampak tidak bias diterbitkan KTP bersangkutan.
3. Lambatnya perekaman data terkirim ke data center di Jakarta.
4. Belum optimalnya pelaporan mengenai kelahiran dan kematian oleh RT maupun Kelurahan.

#### 4.1.12. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Urusan pemberdayaan masyarakat desa merupakan urusan wajib yang menjadi tanggung jawab juga dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi.

Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi dan .Perangkat Daerah.

Disamping itu juga didalam RPJMD 2013-2018 telah menetapkan misi "Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Dalam Bingkai Kearifan Lokal". Melalui misi tersebut, ditetapkan tujuan "Peningkatan peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam

meningkatkan kesejahteraan sosial dengan mengembangkan seni, budaya serta memperhatikan kearifan lokal". Sasaran dari tujuan ini adalah, terwujudnya peran masyarakat dalam pembangunan Kota Jambi. Adapun strategi yang diterapkan untuk mewujudkan misi ini adalah dengan upaya peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Keseluruhan langkah strategis ini dicapai untuk mewujudkan Kota Jambi Bangkit Tahun 2018.

Pada tahun 2017, total anggaran belanja langsung untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dalam APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 10.305.943.000,00 untuk melaksanakan 8 (Delapan) Program dan 31 (Tiga Puluh Satu) kegiatan. Realisasi keuangan yang dapat direalisasikan dari belanja langsung Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi adalah sebesar Rp. 10.651.421.000,00 (99,48%).

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang signifikan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan pemberdayaan masyarakat desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi pada tahun anggaran 2017.

#### 4.1.13. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan tugas dan tanggung jawab dari OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Jambi.

Adapun isu strategis yang berkaitan dengan masalah pokok di bidang pemberdayaan program Keluarga Berencana (KB) di Kota Jambi adalah masih tingginya angka kelahiran yang tidak terkontrol, implikasi dari fenomena ini adalah masih tingginya jumlah tindak KDRT dan anak, masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Tantangan tersebut harus ditangani secara efektif dan tepat sasaran dengan menetapkan program yang tepat pula.

Pada tahun 2017, total anggaran belanja daerah untuk urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Jambi dalam APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 12.559.147.780,00 terealisasi sebesar Rp. 11.762.595.308,00 (93,65%).

Adapun pencapaian dan hasil yang telah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi, sesuai dengan pencapaian target Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD Kota Jambi yang dicapai selama kurun waktu

tahun 2017 adalah Pelayanan peserta KB baru dengan total 14.401 akseptor (84,05% atau 17.134 orang dari PPM), pelayanan KB Pria sebanyak 1.175 akseptor (158,6%) dari PPM sebanyak 741 orang dengan KB Pria Aktif 3.388( 4,80%) dari PUS sejumlah 741 pasangan. Sepanjang tahun 2017 terjadi 11 kali kegagalan dan 7 kasus komplikasi alat kontrasepsi namun telah ditangani secara medis.

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang signifikan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Jambi pada tahun anggaran 2017.

#### 4.1.14. URUSAN PERHUBUNGAN

Selanjutnya, untuk Urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kota Jambi telah dialokasikan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.9.229.867.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.897.867.000,00 atau sebesar 96,40%.

Berkenaan dengan alokasi dana yang dianggarkan pada Dinas Perhubungan Kota Jambi tersebut, telah dilaksanakan kegiatan untuk Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Perhubungan dan Peningkatan efektifitas operasional pemungutan retribusi parkir, pembayaran premi asuransi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi juru parkir, penyediaan papan informasi parkir, pembatas kecepatan kendaraan, pemasangan besi pembatas, pemeliharaan palang parkir untuk *barrier gate*, melaksanakan razia juru parkir liar, pengawas petugas parkir, serta melaksanakan pengaturan parkir.

#### 4.1.15. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Urusan Informasi dan Komunikasi diselenggarakan oleh 2 (dua) institusi, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika dan Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kota Jambi. Pada tahun 2017, dana yang dialokasikan untuk mewujudkan pemerintahan yang professional dan bersih (clean governance), sesuai dengan misi ke-4 RPJMD Kota Jambi dengan Program Optimalisasi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan tiga kegiatan dengan dana sebesar Rp. 3.974.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.678.216.091,00 atau 92,55% dengan realisasi fisik sejumlah 97,78%. Dan untuk Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kota Jambi dengan anggaran sebesar Rp.5.344.080.000,00 dengan realisasi Rp.5.274.920.973,00 atau 98% dengan realisasi fisik 100%.

Guna mewujudkan misi Pemerintahan yang Profesional dan Bersih, pemerintah kota Jambi melakukan peningkatan jaringan komunikasi dan informatika yang terintegrasi, melaksanakan diseminasi informasi yang efektif dan pengelolaan data secara elektronik untuk menjadikan Jambi sebagai Kota Pintar (*Smart City*). Pada Tahun 2017 Kota Jambi terpilih sebagai 25 Kota/Kabupaten Gerakan menuju 100 *Smart City* dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam penyelenggaraan urusan Informasi dan Komunikasi masih terdapat kendala yaitu terbatasnya Sumber Daya Aparatur yang menguasai Teknologi Informasi dan Komunikasi serta alokasi anggaran yang terbatas untuk urusan ini, karena distribusi belanja langsung lebih diprioritaskan pada program dan kegiatan yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat.

#### 4.1.16. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Penyelenggaraan urusan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah merupakan urusan wajib yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah. Dalam RPJMD 2013-2018 pada misi 2 tentang arah kebijakan yang berisikan untuk mendorong dan meningkatkan tumbuh kembangnya wirausaha baru. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengembangkan Koperasi dan UKM.

Pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah saat ini lebih mengarah pada upaya penciptaan kemandirian, partisipasi, daya inovasi dan kreativitas pelaku Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai motivator dan fasilitator yang tujuannya adalah mencapai kemandirian, kematangan dan kedewasaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin kompleks.

Pada tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, UKM Kota Jambi menganggarkan dana sebesar Rp. 5.167.230.000,00 dengan realisasi Rp. 4.874.328.025,00 atau 94,33%. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun ini antara lain pembinaan, pelatihan, penyuluhan, serta pengawasan terhadap Koperasi dan pemberian bantuan pada pelaku UMKM juga mempromosikan berbagai macam hasil produk-produk UMKM ke luar daerah melalui pameran-pameran.

Target yang ditetapkan untuk Koperasi Aktif dan UMKM mandiri masing-masing 5 unit sesuai dengan target RPJMD Kota Jambi, sampai dengan tahun 2017 jumlah koperasi aktif sebanyak 213 unit dan UMKM mandiri 165 unit.

#### 4.1.17. URUSAN PENANAMAN MODAL

Urusan Penanaman Modal merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi seiring dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi. Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal ditujukan untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam menarik investor dalam pengembangan usaha di Kota Jambi.

Anggaran yang dialokasikan untuk urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi pada tahun 2017 Belanja Langsung sebesar Rp. 3.719.600.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.466.129.550,00 dan realisasi fisik sebesar 96,88%. Pencapaian realisasi keuangan sebesar 93,19%. Pada tahun 2017, penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal dijabarkan kedalam 9 program dengan 32 kegiatan. Adapun pencapaian beberapa program dan kegiatan pada tahun 2017 diantaranya adalah:

1. Realisasi Investasi PMDN melalui Izin Prinsip Penanaman Modal, baik yang terbit pada tahun 2017 maupun terbit pada tahun sebelumnya sampai dengan bulan Desember tahun 2017 terealisasi sebesar Rp. 527.417.530.763,00.
2. Penerbitan 10.172 izin baru dan sebanyak 12.605 izin yang diregistrasi (daftar ulang).
3. Melaksanakan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan metode survey kemasyarakatan melalui 9 unsur pelayanan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) pada tahun 2017 dapat dikonversi dengan angka IKM 85,23% dengan mutu pelayanan pada kategori \*SANGAT BAIK\*.
4. Selama tahun 2017, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi telah mengikuti Promosi Investasi sebanyak 4 (empat) kali. Promosi ini bertujuan mengenalkan kepada calon investor dalam dan luar negeri tentang potensi-potensi investasi yang ada di Kota Jambi dengan harapan dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kota Jambi.
5. Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah yang bertujuan mensinergikan antara aktivitas pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan investasi serta memberikan multiplier effect positif bagi perekonomian daerah.

Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai oleh Urusan Penanaman Modal adalah peningkatan realisasi investasi dan pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Adapun pencapaian realisasi investasi



Kota Jambi pada semester IV (bulan Desember) tahun 2017 sebesar Rp. 527.417.530.763,00 Untuk pencapaian IKM pada tahun 2017 mengalami peningkatan dengan status “SANGAT BAIK”, menghasilkan angka 85,23% tercapai dengan angka yang sangat memuaskan.

Adapun keberhasilan dari DPMPTSP Kota Jambi pada tahun 2017, antara lain:

1. Meraih Penghargaan sebagai Role Model Pelayanan Publik di Indonesia dengan Kategori “A”. DPMPTSP Kota Jambi menempati urutan ketiga dari 59 Kabupaten/Kota yang di release oleh Kementrian PAN-RB. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas keberhasilan kepada Walikota Jambi yang memiliki komitmen tinggi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik didaerahnya yang mengedepankan kemudahan, kecepatan dan transparansi.
2. Meraih Penghargaan dari Kementerian PUPR karena keberhasilan Kota Jambi dalam memberikan kemudahan perizinan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Meraih Penghargaan Local Governance Capacity for Bussiness (LGCB) Award 2017. Penghargaan ini diberikan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) kepada Kota Jambi sebagai salah satu kota yang berhasil membangun suasana usaha atau investasi yang kondusif.
4. Meraih Predikat Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau) dari OMBUDSMAN RI, berdasarkan observasi dan evaluasi indeks kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, Kota Jambi meraih nilai 85,23%. Standar penilaian meliputi: atribut, tanda layanan yang wajib disediakan pada setiap unit pelayanan publik.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Penanaman Modal adalah kegiatan Pengelolaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE), tidak dapat dilaksanakan karena Surat Keputusan Pelimpahan kewenangan dalam penandatanganan Izin Prinsip Penanaman Modal baru diterima pada akhir Triwulan IV, sehingga pelaksanaan kegiatan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) tidak optimal, dan ini berpengaruh pada sosialisasi peraturan penanaman modal yang salah satunya berisi tentang kewajiban bagi para penanaman modal untuk memiliki izin prinsip penanaman modal, sebelum memulai kegiatan investasi ataupun dalam proses pelaksanaan pengembangan investasi, dan investor juga memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala.

#### 4.1.18. URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Urusan Pemuda dan Olahraga merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi. Penyelenggaraan urusan Pemuda dan Olahraga ditujukan untuk meningkatkan peran Pemuda dan Olahraga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan upaya memberikan kesempatan kepada pemuda untuk berkreatifitas, pengembangan jiwa kewirausahaan pemuda, peningkatan sarana dan prasarana olahraga dan pelaksanaan event-event pertandingan serta pencarian atlet-atlet berprestasi dan pembinaannya. Pada tahun anggaran 2017, anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung untuk membiayai program dan kegiatan urusan Pemuda dan Olahraga yang telah dilaksanakan baik untuk peningkatan sarana/prasarana maupun peningkatan mutu, yaitu; Program pelayanan administrasi perkantoran dengan alokasi anggaran sebesar Rp.723.095.000,00 terealisasi Rp. 693.247.069,00 (95,87%), Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp.255.490.000,00 terealisasi Rp. 253.155.650,00 (99,08%), Program peningkatan disiplin aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 terealisasi Rp. 19.476.600,00 (97,38%), Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.000.000,00 terealisasi Rp. 22.000.000,00 (100%), Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.800.000,00 terealisasi Rp. 13.800.000,00 (100%), Program Perencanaan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.195.000,00 terealisasi Rp. 12.195.000,00 (100%), Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Kepemudaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.380.970.000,00 terealisasi Rp. 2.172.223.951,00 (91,23%).

Adapun pencapaian beberapa prestasi pada tahun 2017 diantaranya adalah Juara I Napak Tilas di Batang Hari Tahun 2017, Juara I Sepak Bola Gubernur Cup Tahun 2017, Pengiriman BPAP ke Tingkat Nasional 5 orang ke Sawah Lunto Sumbar Pengiriman PASKIBRAKA ke Tingkat Provinsi 10 orang. Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013 – 2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai oleh urusan Pemuda dan Olahraga adalah peningkatan jumlah sarana dan prasarana olahraga, seni dan budaya serta terselenggaranya event berskala nasional/internasional. Pencapaian IKU pada tahun 2017 ditargetkan meningkat menjadi 40% dari target tahun 2016 sebesar 30%. Urusan Pemuda dan Olahraga pada tahun 2017 telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target IKU tersebut, diantaranya adalah pengadaan drumband serta pelaksanaan Bola Volly, Bola Kaki, Bola Tenes Lapangan dan Futsal Piala Walikota Jambi. Walau telah melakukan berbagai

upaya, namun IKU tersebut pada tahun 2016 belum tercapai terutama dari sisi peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pemuda dan Olahraga adalah keterbatasan dana yang tersedia, sehingga menyebabkan minimnya peningkatan jumlah sarana dan prasarana olahraga.

#### Prestasi Yang Pernah diraih tahun 2017:

1. Juara I Napak Tilas di Batang Hari Tahun 2017.
2. Juara I Sepak Bola Gubernur Cup Tahun 2017
3. Pengiriman BPAP ke Tingkat Nasional 10 orang ke Sawah Lunto Tahun 2017
4. Pengiriman PASKIBRAKA ke Tingkat Provinsi 10 orang Tahun 2017.

#### 4.1.19. URUSAN KEBUDAYAAN

Urusan kebudayaan merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Jambi. Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan ditujukan untuk melestarikan nilai-nilai budaya dengan cara pembinaan sanggar-sanggar seni dan pelestarian cagar budaya di Kota Jambi. Peningkatan sarana dan prasarana seni dan budaya serta pelaksanaannya dan mengikuti even-even seni budaya di dalam maupun di luar daerah.

Anggaran yang dialokasikan untuk urusan Kebudayaan pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.637.275.000,00 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.518.492.800,00. Realisasi fisik sebesar 100%. dan realisasi keuangan sebesar 92,75%. Pada tahun 2017, untuk menyelenggarakan urusan kebudayaan dijabarkan kedalam satu program dengan dua kegiatan. Adapun pencapaian beberapa kegiatan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan dan promosi Kesenian dan Budaya Daerah.
  - Malam Gelar Seni Budaya Tanah Pilih Kota Jambi
  - Festival Cap go Meh
  - Festival Angso Duo
  - Apresiasi Seni dan Budaya
2. Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah.
  - Lomba Perahu.
  - Lomba Pemilihan Bujang Gadis Kota Jambi
  - Haul Pangeran Wirokusumo dan Haul Tuanku Keramat Tambak
  - Promosi Produk Daerah di Batam
  - Promosi Kesenian di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta

Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai oleh Urusan Kebudayaan adalah peningkatan jumlah sarana dan prasarana olahraga, seni dan budaya. Pencapaian IKU pada tahun 2017 ditargetkan menjadi 60% dari target 2014 sebesar 20%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Kebudayaan adalah kekurangan tenaga teknis yang memiliki latar belakang pendidikan kebudayaan. Selain itu masih kurangnya sarana pendukung untuk kegiatan di lapangan.

### 3. Pengembangan dan Promosi Kesenian dan Budaya Daerah.

- Gelar Promosi Seni Budaya Tanah Pilih Pusako Betuah
- Festival Danau Teluk
- Lomba Mars dan Hymne Kota Jambi
- Pawai Budaya
- Festival Batanghari
- Lomba Seni Harmoni Tanah Pilih

### 4. Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah.

- Lomba Perahu.
- Lomba Pemilihan Bujang Gadis Kota Jambi
- Haul Pangeran Wirokusumo dan Haul Tuanku Keramat Tambak
- Bulan Promosi Pemerintah Kota Jambi di TMII Jakarta
- Promosi Produk Daerah di Batam
- Promosi Kesenian di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta
- Pawai Pembangunan dalam rangka HUT RI ke71

#### 4.1.20. URUSAN PERPUSTAKAAN

Urusan perpustakaan merupakan urusan wajib yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi. Pendidikan dan dunia perpustakaan merupakan sasaran strategis Pemerintah Kota Jambi dalam menyusun rencana pembangunan bidang pendidikan yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Jambi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Jambi tahun 2013-2018, yaitu dalam rangka misi “Mewujudkan Masyarakat Kota Jambi yang Berakhlak, Berbudaya dan Berdaya Saing”, dengan tujuan “Meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat Kota Jambi melalui pendidikan yang unggul, terjangkau, dan merata”. Strategi yang dicapai untuk mencapai

tujuan tersebut adalah dengan meningkatkan mutu dan akses pendidikan, yaitu dengan arah kebijakan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.

Alokasi anggaran belanja langsung untuk urusan perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi untuk tahun anggaran 2017 yang tertuang di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi adalah sebesar Rp. 681.410.000,-00 dengan realisasi fisik sebesar 98,94% dan realisasi keuangan sebesar Rp 661.274.100,00 atau 97% untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan di bidang Perpustakaan.

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang signifikan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada tahun anggaran 2017.

#### 4.1.21. URUSAN KEARSIPAN

Urusan kearsipan merupakan urusan wajib yang menjadi tanggung jawab Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi.

Kearsipan dan dokumentasi merupakan salah satu sasaran strategis pemerintah Kota Jambi dalam menyusun rencana pembangunan bidang kearsipan yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi pemerintah Kota Jambi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Jambi tahun 2013 - 2018, yaitu dalam rangka misi "Mewujudkan Masyarakat Kota Jambi yang Berahklak, Berbudaya dan Berdaya Saing". Dengan tujuan "Meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat kota jambi melalui pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata". Strategi yang dicapai untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan meningkatkan mutu dan akses pendidikan, yaitu dengan arah kebijakan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.

Alokasi anggaran belanja langsung yang menjadi urusan kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi untuk Tahun Anggaran 2017 yang tertuang di dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi adalah sebesar Rp. 726.145.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 699.061.200,00 (96,27%). Dialokasikan untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan di bidang Kearsipan.

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang signifikan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi pada tahun anggaran 2017.

## **4.2. URUSAN PILIHAN**

### **4.2.1. URUSAN PARIWISATA**

Urusan Pariwisata merupakan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Jambi, Penyelenggaraan Urusan Pariwisata ditujukan untuk meningkatkan peran Pariwisata yang berbasis potensi daerah serta memperhatikan kearifan lokal melalui peningkatan kunjungan wisatawan, penyelenggaraan event dan promosi pariwisata di dalam dan luar daerah serta mengikuti event pariwisata tingkat nasional/internasional.

Anggaran yang dialokasikan untuk urusan Pariwisata pada tahun 2017 sebesar Rp.1.282.330.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.271.060.750,00 dan realisasi fisik sebesar 92,75%. Penyerapan anggaran tidak maksimal dikarenakan ada beberapa Event ke luar daerah yang tidak dapat dilaksanakan.

Pada tahun 2017 untuk menyelenggarakan Urusan Pariwisata dijabarkan ke dalam Program Pembinaan, Peningkatan dan Perluasan Pengelolaan Budaya dan Pariwisata dengan kegiatan Pengembangan dan Promosi Pariwisata Daerah. Adapun pencapaian program dan kegiatan pada tahun 2017 diantaranya adalah terselenggaranya Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan melalui Pelaksanaan Lomba Perahu Angsa, Haul Tuanku Keramat Tambak dan Haul Pangeran Wiro Kusumo serta Pemilihan Bujang Gadis.

Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin di capai oleh Urusan Pariwisata adalah terselenggaranya event berskala nasional/ internasional Pencapaian IKU pada tahun 2017 ditargetkan 2 kali terselenggaranya event berskala nasional/internasional. Urusan Pariwisata pada tahun 2017 telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target IKU tersebut, dan terlaksana 2 kali menyelenggarakan event berskala nasional/internasional, yaitu pelaksanaan Haul Pangeran Wiro Kusumo (Kesultanan Jambi) pada bulan Januari 2017 dan Haul Tuanku Keramat Tambak ( Habib Husain Bin Ahmad Baraqbah ) pada bulan Februari 2017 di Seberang Kota Jambi yang dihadiri para peziarah dari berbagai daerah dan mancanegara. Dengan demikian dari 2 event berskala nasional dan internasional yang ditargetkan telah terpenuhi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Pariwisata adalah keterbatasan dana yang tersedia, dan kurangnya inovasi untuk pengembangan destinasi wisata di Kota Jambi.

#### 4.2.2. URUSAN PERTANIAN

Sebagai urusan pilihan, sektor pertanian secara komprehensif perlu dilakukan re-orientasi program ke depan untuk mewujudkan pencapaian tujuan peningkatan kesejahteraan para pelaku usaha pertanian. Berkenaan dengan Misi Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa melalui peningkatan perekonomian kota berbasis potensi lokal menuju kemandirian daerah, sektor pertanian telah melaksanakan program yang meliputi bidang pangan dan hortikultura, bidang peternakan, bidang perikanan dan, bidang sarana prasarana dan penyuluhan. Bidang-bidang ini menjadi unit kerja pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi.

Pada tahun 2017, urusan pertanian mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.498.112.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.353.096.908,00 atau persentase kinerja keuangan 97,36%. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 antara lain:

1. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil pertanian
2. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
4. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
5. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian
6. Pengembangan Agribisnis Peternakan
7. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan dan Pengolahan Informasi Pasar Atas Hasil Produksi Peternakan
9. Pengembangan dan Pelayanan Pemotongan Hewan
10. Pengembangan Bibit Ikan Unggul
11. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
12. Optimalisasi Pengelola dan Pemasaran Produksi Perikanan
13. Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

Pada sektor pertanian, Pemerintah Kota Jambi telah berupaya untuk pengembangan padi sawah dan memberikan bantuan kepada masyarakat petani berupa benih padi sawah, yang bersumber dari APBD Kota Jambi, APBD Provinsi Jambi dan APBN melalui Kementerian Pertanian. Pengembangan pertanian padi sawah yang konvensional di Kota Jambi mengalami kegagalan yang disebabkan oleh bencana banjir, kekeringan dan wabah puso. Penguatan kelembagaan tani pada 221 kelompok tani dan 28 Gapoktan telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi sepanjang tahun

2017. Oleh karenanya, ke depan dibutuhkan program strategis yang dapat memberikan nilai tambah bagi para pelaku usaha sektor pertanian.

Program dan kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian dapat didorong lagi untuk mendukung distribusi dan akses terhadap pasar yang lebih bagi komoditas pertanian di Kota Jambi. Koordinasi dengan perangkat daerah yang terkait untuk mendukung Bergeraknya industri hilir dari sektor pertanian akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan nilai tambah pelaku usaha pertanian di Kota Jambi.

Kegiatan Pengembangan bibit Unggul pertanian/perkebunan pada tahun 2017 adalah penyediaan calon induk dan perbanyak bibit/benih hortikultura yang difokuskan pada perbanyak penyediaan bibit tersebut pada awalnya dapat dilaksanakan 100% dari target yang telah ditentukan. Pengembangan bibit buah-buahan Jambu Air Mayang sebanyak 3000 batang dan Alpukat 1500 batang. Demikian pula dengan pengembangan calon pohon induk yang telah mengalami kenaikan, kesemuanya telah ditanam pada lahan UPTD Balai Benih Hortikultura Mayang.

Pembangunan Pertanian di bidang Peternakan bertujuan untuk Peningkatan produksi mutu produk dan diversifikasi sub sektor peternakan sehingga terpenuhi pangan asal hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH). Pencapaian yang telah dilakukan di sektor Peternakan pada tahun 2017 antara lain adalah Pelayanan kesehatan hewan dari target 150.000 ekor telah terealisasi sebanyak 100%, pemeriksaan sampel Pangan Asal Hewan (PAH) dari target 50 sampel terealisasi sebanyak 50 sampel. Pengendalian dan pemantauan kesehatan hewan ditunjukkan oleh terkendalinya penyakit zoonosis (penyakit hewan menular ke manusia) ditandai dengan berkurangnya kasus penyakit rabies dari 19 kasus positif (tahun 2015) menjadi tidak ada kasus positif (tahun 2017) dan tidak terjadinya kasus Avian Influenza (AI). Selain itu pelaksanaan kegiatan operasi pasar daging sapi di Kota Jambi menjelang hari raya Idul Fitri telah membantu masyarakat Kota Jambi dalam mendapatkan daging sapi yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) dengan harga yang terjangkau dan kegiatan operasi pasar daging sapi ini juga mempengaruhi tidak terjadinya lonjakan harga daging sapi menjelang hari raya Idul Fitri dan hari raya lainnya.

#### 4.2.3. URUSAN PERDAGANGAN

Urusan perdagangan merupakan urusan pilihan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin). Penyelenggaraan Urusan Perdagangan ditujukan untuk peningkatan peredaran barang dan jasa yang sesuai standar, terwujudnya peningkatan jumlah usaha formal dan informal, tercapainya target penerimaan retribusi pelayanan perpasaran sebagai salah satu penyumbang PAD Kota Jambi, meningkatkan



sarana dan prasarana pasar dan sarana penunjang lainnya untuk mewujudkan pasar bersih, kondusif dan refresentatif, serta meningkatkan pelayanan, pembinaan, penataan dan penertiban pedagang pasar dan PKL secara berkesinambungan dan konsisten guna mewujudkan perilaku yang berakhlak dan berbudaya.

Anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Perdagangan pada tahun 2017 sebesar Rp. 8.201.872.800,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 7.824.772.544,00 atau 95,40%. Adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan urusan perdagangan diantaranya adalah:

1. Terlaksananya revitalisasi Pasar Kasang serta pembutan kios, los dan finishing Pasar Olak Kemang.
2. Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan, pameran-pameran, bazar, pasar murah dan pemberian bantuan hibah kepada masyarakat.
3. Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekonomian di pasar rakyat.
4. Terlaksananya penertiban serta pengamanan pasar pada hari-hari besar dengan tujuan untuk meningkatkan ketertiban pedagang kaki lima serta mewujudkan Pasar Kota Jambi yang bersih dan tertib sekaligus rasa aman di lingkungan pasar.
5. Terlaksananya pemantauan dan pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa, juga terlaksananya pembinaan dan penyuluhan bagi IKM.
6. Terlaksananya relokasi Pasar Aur Duri yaitu penataan pedagang dan relokasi Pasar Angso Duo dengan melakukan pemindahan para agen dan sub agen ke Pasar Induk Talang Gulo.
7. Penerimaan dari retribusi pasar grosir atau pertokoan (sewa) pada tahun 2017 ditargetkan Rp. 4.000.000.000,00 dengan realisasi Rp. 4.208.003.501,00 dan penerimaan retribusi UTTP (metrologi) yang ditargetkan Rp. 193.000.000,00 dengan realisasi Rp. 622.141.100,00.

Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, pada tahun 2017 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai oleh Urusan Perdagangan adalah peningkatan cakupan bina perdagangan/usaha informal sebesar 2,90% dengan realisasi sebesar 4,00%, rasio peningkatan sarana dan prasarana pasar-pasar tradisional pemerintah sebesar 83,75% realisasi sebesar 100% dan peningkatan rasio PKL yang tertata sebesar 75% dengan realisasi sebesar 100%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Perdagangan adalah: Kesiapan sumber daya manusia di bidang perdagangan dan perindustrian terutama pada

IKM, pola kemitraan yang belum berjalan secara optimal, juga pengaruh pasar bebas dan persaingan usaha yang semakin ketat.

#### 4.2.4. URUSAN KEHUTANAN

Berkenaan dengan urusan pilihan Kehutanan, Pemerintah Kota Jambi telah berupaya melaksanakan program strategis untuk mewujudkan peningkatan pemenuhan rasio Ruang Terbuka Hijau sebesar 30 % secara bertahap, mengembangkan dan mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta meningkatkan kualitas dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau. Perubahan organisasi perangkat daerah (OPD) merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 pun berdampak pada urusan kehutanan yang beralih dari Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan ke Dinas Lingkungan Hidup. Re-orientasi ini memudahkan koordinasi dan sinergisitas program strategis untuk mencapai target capaian rasio ruang terbuka.

Terintegrasinya kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, memberikan gambaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang representatif dan seperti terlihat pada tabel ini.

No	Nama Ruang Terbuka Hijau	Lokasi ( Kecamatan)	Luas (Ha)
1	RTH Hutan Kota	Kota Baru, Telanaipura, Jambi Timur.	524,00
2	RTH Taman	Kota Jambi (tersebar)	875,90
3	RTH sempadan danau	Telanaipura, Danau Teluk	300,00
4	RTH sempadan sungai	Kota Jambi	325,00
5	RTH Jalau Hijau jalan dan pedestrian	Kota Jambi	93,00
6	RTH Makam	Kota Jambi	140,00
7	RTH Kawasan Perkantoran Pemerintah	Kota Baru dan Telanaipura	27,00
8	RTH Fungsi tertentu (sabuk Hijau)	Kota baru dan Telanaipura	376,50
9	RTH fungsi tertentu (lahan pertanian Perkantoran)	Kota Jambi	956,10
Jumlah			3.617,50

Sumber: DLH Kota Jambi, 2017

Rasio RTH terhadap luas wilayah sesuai UU No. 26 Tahun 2007 adalah 30%, dimana pada tahun 2015 telah dilakukan pengadaan lahan sebanyak 7,17 Ha dari total rencana 94 Ha dilokasi Kel. Bagan Pete, yang terealisasi baru mencapai 41,2 Ha. Untuk tahun 2016 target 9,00% dari luas wilayah semestinya sudah mencapai 2191,63 Ha namun baru terealisasi sebesar 1224.17 Ha atau 6.97%. Demikian pula halnya pada tahun 2017, belum terjadi peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau karena Pemerintah Kota Jambi

berupaya fokus pada pemuthakhiran data dan sistem informasi terhadap ruang terbuka di kota jambi, sinergitas program antar perangkat daerah, serta koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi. Selain itu, pemasangan label pada pohon pelindung di Kota Jambi juga dilaksanakan selama tahun 2017 untuk pengelolaan dan pemeliharaan kualitas ruang terbuka hijau. Pada tahun-tahun ke depan Pemerintah Kota Jambi berkomitmen untuk melaksanakan program penambahan luasan Ruang Terbuka Hijau secara rasional.

#### **4.2.5. URUSAN PERINDUSTRIAN**

Urusan Perindustrian merupakan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi. Penyelenggaraan Urusan Perindustrian ditujukan untuk peningkatan daya saing produk lokal, peningkatan sarana dan prasarana IKM, pembinaan dan peningkatan jumlah IKM serta peningkatan jangkauan wilayah pemasaran produk IKM.

Anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Perindustrian pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.545.110.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.506.911.076,00 (97,53%) dan realisasi fisik sebesar 100 %.

Pada tahun 2017 kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan perindustrian antara lain melaksanakan pelatihan-pelatihan, penyuluhan, pameran, lomba, pemberian bantuan kemasan kepada kelompok IKM serta monitoring dan evaluasi terhadap kehalalan pada produk.

Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai oleh Urusan Perindustrian adalah peningkatan jumlah IKM mandiri, dan peningkatan pertumbuhan industri. Target IKM Mandiri pada tahun 2017 sebanyak 75 IKM Mandiri dengan realisasi sebanyak 80 IKM Mandiri, dan target pertumbuhan industri pada tahun 2017 sebesar 3,10% dengan realisasi 3,54%.

### **4.3. URUSAN PENUNJANG**

#### **4.3.1. INSPEKTORAT**

Dalam rangka menuju good governance, ada tuntutan Reformasi Birokrasi yang telah mendorong adanya konsekuensi logis, perlunya berbagai upaya dan kerja keras dari semua jajaran penyelenggaraan pemerintahan, dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya secara profesional, termasuk didalamnya jajaran Inspektorat Kota Jambi. Inspektorat Kota Jambi sebagai instansi yang melakukan pengawasan internal Pemerintahan memiliki peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan good governance

di lingkungan Pemerintah Kota Jambi, sesuai dengan visi Inspektorat Kota Jambi Menjadi lembaga pengawas internal yang profesional sebagai penjamin mutu dan mitra kerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Inspektorat Kota Jambi Tahun 2013-2018 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Internal;
2. Meningkatkan Profesionalisme Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Secara umum Misi Inspektorat Kota Jambi telah dirumuskan dengan cukup jelas, mudah diingat, selaras dengan visi, terkait dengan Propeda dan selaras dengan Peraturan yang memberi mandat, menjelaskan mengapa organisasi ada serta tersirat tujuan besar yang hendak dicapai.

Pada tahun 2017 di Inspektorat Kota Jambi terdapat 8 (delapan) program dan 30 kegiatan, diantaranya program peningkatan sistem pengawasan, pembinaan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. Adapun anggaran yang dialokasikan untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 sebesar Rp. 3.744.000.000,00 dan penyerapan dana sebesar 86,70% atau sebesar Rp. 3.246.058.116,00, yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 1.045.587.500,00 terealisasi Rp. 993.196.777,00 (94,99%) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana sebesar Rp. 321.682.500,00 terealisasi Rp. 286.680.139,00 (89,12%). Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar Rp. 25.300.000,00 terealisasi Rp. 23.550.000,00 (93,08%). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp. 252.750.000,00 terealisasi Rp. 197.310.000,00 (78,07%). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp.12.575.000,00 terealisasi Rp. 11.975.000,00 (95,23%). Program Perencanaan SKPD sebesar 5.100.000,00 terealisasi Rp. 4.800.000,00 (94,12%). Program Pengembangan Data/Informasi Rp. 14.150.000,00 terealisasi Rp.7.200.000,00 (50,88%). Program Peningkatan Sistem Pengawasan, Pembinaan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH sebesar Rp. 2.066.855.000,00 teralisasi Rp. 1.721.346.200,00 (83,28%). Permasalahan yang ditemui dilapangan yang dapat menghambat pencapaian target WTP, diantaranya masih bermasalahnya penataan asset di beberapan SKPD di Kota Jambi.

#### 4.3.2. PERENCANAAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jambi mengalokasi anggaran untuk melaksanakan urusan Perencanaan Pembangunan, anggaran yang

dialokasikan yaitu sebesar Rp 8.486.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 7.873.329.234,00 atau 92,78 %, sedangkan realisasi fisiknya sebesar 95,84%.

Selanjutnya untuk melaksanakan urusan perencanaan pembangunan Bappeda Kota Jambi pada Tahun 2017 melaksanakan 8 Program dengan 29 Kegiatan yang antara lain melaksanakan Sistem Perencanaan Elektronik *e-planning* Versi 2.0, melaksanakan Forum SKPD Musrenbang RKPD Tingkat Kota Jambi tahun 2017 untuk perencanaan 2018, menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2018, buku Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2017, buku KUA PPAS Tahun Anggaran 2018 dan buku KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2017, buku Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Summary LKPJ Walikota Jambi tahun 2017, menyusun laporan pelaksanaan DAK tahun 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005, melaksanakan koordinasi dengan SKPD dan stakeholders lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan bidang infrastruktur, bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan sumberdaya manusia di Kota Jambi; menyusun Buku Jambi Dalam Gambar; Menyusun Feasibility Study Techno Park; menyusun Kajian Daya Saing Kota Jambi; Menyusun kajian faktor-faktor pendorong urbanisasi; Inventarisasi dan identifikasi Keragaman budaya Kota Jambi; menyusun Analisa Ketimpangan Gender Kota Jambi; Menyusun Analisa Tingkat Pengembalian Investasi Pendidikan di Kota Jambi; Menyusun Analisa Kondisi Ketenagakerjaan Kota Jambi; Menyusun kajian Peranan Pembantu dan Anggota Rumah Tangga lain Terhadap Partisipasi Kerja dan Lapangan Usaha Ibu Rumah Tangga di Kota Jambi; Menyusun Analisa Kependudukan dan Bonus Demografi Kota Jambi; menyusun Kajian Kesesuaian Ruang di Kota Jambi. Melaksanakan Koordinasi Pembangunan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Jambi; serta melaksanakan kegiatan non urusan lainnya seperti peningkatan sarana prasarana kantor; menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisari realisasi kinerja Bappeda; melaksanakan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi maupun instansi terkait lainnya.

#### 4.3.3. KEUANGAN

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta tugas pembantuan.

Pada tahun 2017 BPKAD mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 9,662,166,743.00,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 8,543,974,934.00,00 atau 88,43 % dan realisasi fisik sebesar 100%. Pada tahun 2017

BPKAD melaksanakan 6 program rutin (22 kegiatan) dan 1 program urusan (24 kegiatan). Pada tahun 2017 target kontribusi yang diberikan dari pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah sebesar Rp. 390.892.633.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 336.251.791.862.56,00 (86,02%).

Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai oleh BPKAD Kota Jambi adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pencapaian IKU tersebut pada tahun 2017 menunggu hasil audit oleh BPK, sedangkan pada tahun 2016 pencapaian IKU sudah menghasilkan WTP. Progres capaian yang diperoleh sampai saat ini adalah 75% dengan upaya yang telah dilakukan berupa penatausahaan aset dengan menggunakan sistem/aplikasi yang terintegritas dengan sistem/aplikasi keuangan dan juga menginventarisir selisih seluruh data barang milik daerah dengan neraca secara komprehensif yang melibatkan seluruh elemen dan unsur terkait. Akan tetapi WTP tersebut masih terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

1. Aset Tetap Peralatan dan Mesin tidak dapat ditelusuri rinciannya pada DBMD sebesar Rp. 7,45 Miliar dan Aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp. 4,94 Miliar tidak diketahui keberadaannya
2. Aset tetap lainnya tidak dapat ditelusuri rinciannya pada DBMD sebesar Rp. 6,32 miliar dan Aset tetap lainnya pada dua SKPD tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp.4,15 miliar

Langkah-langkah yang dilakukan oleh BPKAD Kota Jambi untuk perbaikan meliputi:

1. Melakukan Inventarisasi Aset terhadap Sisa OPD yang belum melakukan Inventarisasi sebanyak 17 yaitu OPD dengan Progres Capaian 12 SKPD
2. Melakukan Update data melalui aplikasi aset
3. Pengurusan Sertifikat Aset Tanah Milik Pemda Kota Jambi

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pendapatan dan tugas pembantuan dengan melakukan perencanaan, pembinaan dan pengendalian sumber – sumber pendapatan daerah yang meliputi pendataan, penetapan, penagihan, perencanaan dan Pelaporan, Pengendalian dan Penyuluhan, Ketatausahaan/Kesekretariatan serta melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan kepala daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pada Tahun 2017 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 8.407.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 6.807.095.987,00 atau 80,97% dan realisasi fisik sebesar 94,54%.

Pada Tahun 2017 BPPRD melaksanakan 6 program rutin (24 Kegiatan ) dan 1 program urusan (5 kegiatan). Adapun pencapaian beberapa program dan kegiatan pada tahun 2017 diantaranya:

- a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan/Penerimaan Daerah.
  - Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat.
  - Updating basis data pajak daerah sert optimalisasi pemanfaatan kepada masyarakat.
  - Kebijakan Insentif.
  - Melakukan evaluasi dan pengkajian perkembangan Pajak Daerah guna mendapatkan data potensi dari Pajak Daerah.
  - Mengoptimalkan pelaksanaan pendataan melalui survey lapangan terhadap perkembangan/ perubahan data objek pajak, dengan melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan wajib pajak seperti tutup usaha, perubahan tempat, ukuran dan lain sebagainya.
  - Melakukan pengkajian Peraturan – Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku.
- b. Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi pada Tahun 2017 sebesar Rp. 200.024.000.000,15,00 realisasi penerimaan yang dapat di capai adalah sebesar Rp. 202.865.713.413,15 atau 101,42% dengan demikian pada Tahun 2017 mengalami peningkatan penerimaan sebesar Rp. 2.841.713.413.15,00 atau sebesar 1,42%.

Sedangkan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Jambi Tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp. 34.000.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 21.980.028.497,00 atau 64,65%.

Permasalahan/kendala yang dihadapi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Daerah yaitu:

- ✓ Pelayanan melalui situs pemerintah belum ditunjang oleh system manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur dan keterbatasan sumber daya manusia sangat membatasi penetrasi komputerisasi ke dalam system manajemen dan proses kerja pemerintah.
- ✓ Belum mapannya strategi optimalisasi PAD sektor pajak daerah.
- ✓ Tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan pajak online pada instansi pemungut pajak daerah.

Upaya yang dilaksanakan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam mengatasi permasalahan yang ada antara lain:

- Penyederhanaan dan modernisasi/komputerisasi Sistem Perpajakan Daerah.
- Penyempurnaan landasan hukum serta Law Enforcement bagi pengenaan pajak
- Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat.
- Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah.
- Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit satuan kerja terkait.
- Peningkatan kualitas aparatur pajak daerah.
- Kebijakan insentif.

#### 4.3.4. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Untuk mencapai misi ke-4 (empat) dari RPJMD Kota Jambi, didalam mewujudkan pemerintahan yang profesional dan bersih (*Clean Government*), maka pemerintah Kota Jambi melalui BKPSDMD sebagai pelaksana kegiatan, telah membuat Indikator Kinerja Utama didalam pencapaian misi tersebut, yaitu Rasio jabatan terhadap Pendidikan dan Keahlian. Target RPJMD untuk indikator ini pada tahun 2017 adalah sebesar 80%, dengan jumlah pegawai negeri sipil 6.581 orang, dimana 55,78% didominasi dengan tamatan S1, diikuti 23,71% tamatan SD-SMA, tamatan D1-D3 sebesar 15,49% dan hanya 0.15% S3 serta 4,86% S2, dengan program-program yang telah dilaksanakan, pada tahun 2017 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 5.988.875.000,- untuk melaksanakan program pembinaan dan pengembangan aparatur. Realisasi keuangan sebesar 81,44% (Rp. 4.877.463.726,00) dan 98% realisasi fisik.

Dengan program-program yang telah dilaksanakan, maka pencapaian indikator kinerja utama didalam penempatan aparatur sesuai dengan bidang pendidikan, dan keahlian sesuai dengan IKU RPJMD adalah sebesar 95,00% dari target yang telah ditentukan oleh RPMJD yaitu 80%. Pada Tahun 2017 Pemerintah Kota Jambi telah berkoordinasi dengan Diklat Propinsi untuk mengirim peserta diklat struktural (PIM 3 dan PIM 4) dan mempersiapkan kontribusi sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh Propinsi Jambi dan mengirim peserta diklat PIM 2 sesuai yang telah di jadwalkan oleh pemerintah pusat.

Kedepan pemerintah Kota Jambi telah berkoordinasi dengan diklat propinsi untuk mengirim peserta diklat struktural (PIM 3) dan mempersiapkan kontribusi sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh Propinsi Jambi dan mengirim peserta diklat PIM 2 sesuai yang telah di jadwalkan oleh pemerintah pusat serta mengadakan sendiri diklat PIM 4 di Kota Jambi.



#### **4.4. URUSAN PENDUKUNG**

##### **4.4.1. SEKRETARIAT DAERAH**

Sekretariat Daerah adalah unsur pendukung kepala daerah yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya. Dimana di Kota Jambi sekretariat daerah terdiri atas 11 bagian. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada sekretariat daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 54.152.638.000,00, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 50.465.230.807,00 atau 93,19% untuk pelaksanaan 15 Program dan 64 kegiatan.

Pada tahun 2017 Bagian Perekonomian Setda Kota Jambi dialokasikan anggaran sebesar Rp. 289.000.000,00 untuk kegiatan Pengendalian Produksi dan Distribusi. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk melaksanakan Kebijakan Pemerintah di Bidang Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang ada di Kota Jambi. Dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program Nasional Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 kg, Bagian Perekonomian Setda Kota Jambi melaksanakan koordinasi antar Dinas/Instansi Konsultan, PT. Pertamina, Pemerintah Provinsi Jambi dan Ditjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM RI tentang Pelaksanaan Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg di Kota Jambi, membentuk Tim Pendukung Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 kg di Kota Jambi dan melakukan Pengawasan dan Pemantauan terhadap pendistribusian Paket LPG 3 kg pada 11 Kecamatan di 62 Kelurahan dalam Kota Jambi. Selain itu juga dilakukan pemantauan dan pembinaan bagi forum CSR Kota Jambi.

Untuk urusan kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi keagamaan dilaksanakan oleh Bagian Kesra Setda Kota Jambi, dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan di bidang keagamaan dengan kegiatan antara lain pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Jambi, Festival Anak Sholeh, TC kafilah Kota Jambi, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah pemberian insentif bagi 272 orang petugas syara, 900 orang guru ponpes diniyah taklimiyah dan 55 orang tenaga pengajar Pengajian Keagamaan (TPPK).

Adapun kegiatan Fasilitasi dan Peningkatan Kerjasama Antar Daerah pada tahun 2017 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 500.000.000,00 dimana realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan sebesar 91,23% atau Rp. 456.173.667,00 Yang didalamnya terdapat Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) Kota Jambi, dan Tim Teknis TKKSD. TKKSD yang merupakan tim koordinasi penyelenggaraan kerjasama daerah, dimana setiap kerjasama harus melalui kajian Tim TKKSD untuk mendapatkan kerjasama yang saling menguntungkan, Tim Teknis TKKSD untuk memfasilitasi dan menyiapkan bahan-bahan yang akan di bahas dalam rapat Tim TKKSD. Selain itu pada bagian kerjasama juga terdapat kegiatan APEKSI.

Pada bagian Organisasi Setda Kota Jambi terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain Penataan Sistem Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah, Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, dan Instrumen Analisis Jabatan PNS. Sedangkan untuk pelaksanaan dan penyiapan bahan kebijakan dalam penyusunan dan perumusan produk hukum dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kota Jambi. Untuk penambahan asset berupa tanah bagi pemerintah kota jambi sudah dilaksanakan oleh Bag. Pemerintah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.840.000.000,00 dengan Realisasi Rp. 6.674.362.850,00.

Adapun hasil dan prestasi yang telah dicapai Kota Jambi selama kurun waktu tahun 2017 yang berhasil didapat melalui koordinasi Sekretariat Daerah Kota Jambi adalah sebagai berikut:

1. Juara Umum MTQ ke 47 Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2017 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Juara umum Festival Anak Shaleh Indonesia (FASI) ke XV Tingkat Provinsi Jambi di Kota Jambi.
3. Pemenang I Tingkat SD/MI Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2017.
4. Penghargaan hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dari OMBUDSMAN RI terhadap produk pelayanan administrasi di Kota Jambi, dari 53 produk layanan administrasi di peroleh nilai 85.22 dan masuk dalam Zona Hijau dengan Predikat Kepatuhan Tinggi.
5. Penghargaan sebagai Role Model Pelayanan Publik di Indonesia dengan Kategori "A". Penghargaan dari Kementerian PAN-RB sebagai Apresiasi atas keberhasilan kepada Walikota Jambi yang memiliki komitmen tinggi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik didaerahnya yang mengedepankan kemudahan, kecepatan dan transparansi yang diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi
6. Penghargaan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 dengan nilai "B"

#### 4.4.2. SEKRETARIAT DPRD

Selanjutnya untuk melaksanakan urusan Sekretariat DPRD, pada tahun 2017 ini melaksanakan 8 (delapan) program, dua program penunjang pelayanan administrasi dan 6 (enam) program rutin lainnya. Anggaran yang dialokasikan untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 sebesar Rp. 37.363.490.000,00 dengan total realisasi keuangan sebesar Rp. 32.765.155.771,00 (87,7%) dan realisasi fisik sebesar 98,2%. Adapun

program yang dilaksanakan adalah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang bertujuan untuk memberikan wawasan dan meningkatkan kapasitas aparatur sekretariat dan anggota DPRD dan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan DPRD yang bertujuan terselenggaranya penerimaan tamu DPRD dan terwujudnya komunikasi dan koordinasi dengan lembaga negara lain. Secara umum tidak terdapat permasalahan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat Dewan.

## **4.5. URUSAN KEWILAYAHAN**

### **4.5.1. KECAMATAN**

Pemerintah Kota Jambi melalui visi dan misi Walikota Jambi, telah menetapkan misi “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Dalam Bingkai Kearifan Lokal”. Melalui misi tersebut, ditetapkan tujuan “Peningkatan peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dengan mengembangkan seni, budaya serta memperhatikan kearifan lokal”. Sasaran dari tujuan ini adalah, terwujudnya peran masyarakat dalam pembangunan Kota Jambi. Adapun strategi yang diterapkan untuk mewujudkan misi ini adalah dengan upaya peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Keseluruhan langkah strategis ini dicapai untuk mewujudkan Kota Jambi Bangkit Tahun 2018.

Bedasarkan Perda nomor 13 Tahun 2014 Kecamatan dalam Kota Jambi mengalami pemekaran dari 8 Kecamatan yaitu Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Telanaipura, Kecamatan Pelayangan, Kecamatan Danau Teluk, Kecamatan Jambi Selatan, Kecamatan Pasar Jambi, Kecamatan Jambi Timur, menjadi 11 Kecamatan yang terdiri dari 8 Kecamatan sebelumnya ditambah dengan Kecamatan Alam Barajo, Danau Sipin dan Paal Merah. Namun Pelaksanaan urusan kewilayahan di 11 Kecamatan dalam Kota Jambi baru di laksanakan pada tahun 2017 ini. Dengan luas Wilayah Kota Jambi Menurut Perda RTRW berdasarkan kondisi eksisting 175.53 km<sup>2</sup>.

Urusan pemberdayaan masyarakat kecamatan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tanggung jawab dari Kecamatan Dalam Kota Jambi yang terangkum pada satu program kegiatan yaitu program pemberdayaan masyarakat dengan alokasi anggaran untuk Kecamatan Kota Baru Rp. 3.281.920.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 3.160.757.799,00 atau 96,31%, Kecamatan Telanaipura Rp. 3.857.041.200,00 telah terealisasi sebesar Rp. 3.636.299.028,00 atau 94,28%, Kecamatan Jelutung Rp. 3.819.436.500,00 telah terealisasi sebesar Rp. 3.694.946.100,00 atau 96,74%, Kecamatan Pelayangan 2.067.695.535,00 telah terealisasi sebesar Rp. 1.838.312.875,00 atau 88,91%, Kecamatan

Danau Teluk Rp.2.562.530.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.361.530.750,00 atau 92,16%, Kecamatan Jambi Selatan Rp. 3.055.718.350,00 telah terealisasi sebesar Rp. 2.951.127.362,00 atau 96,58%, Kecamatan Pasar Jambi Rp. 2.085.314.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.084.136.440,00 atau 99,67%, Kecamatan Jambi Timur Rp.3.901.999.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.859.726.500,00 atau 98,92%, Kecamatan Alam Barajo Rp. 3.446.240.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.335.808.500,00 atau 96,80%, Kecamatan Danau Sipin Rp. 2.961.282.500,00 terealisasi sebesar Rp. 2.072.441.100,00 atau 99,67%, dan Kecamatan Paal Merah Rp.3.721.519.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.058.653.897,00 atau 82,19%.

Untuk Program Pemberdayaan Masyarakat yang dikerjakan di beberapa Kecamatan dalam Kota Jambi ada beberapa kegiatan seperti Kegiatan Bangkit Berdaya, Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan, Koordinasi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan, Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan. Untuk Kegiatan Bangkit Berdaya yang bertujuan membantu pembangunan di Kota Jambi dengan mengajak partisipasi masyarakat secara swadaya sejak Tahun 2014 sampai saat ini. Dari kegiatan tersebut pembangunan infrastruktur di Kota Jambi Khususnya di Lingkungan Kecamatan mengalami peningkatan dan terjadi efisiensi anggaran untuk bidang infrastuktur yang tadinya di kerjakan PUPR bisa di kerjakan Kecamatan masing-masing secara swadaya masyarakat.

#### **4.6. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

##### **4.6.1. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI**

Dana yang dialokasikan untuk melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri pada tahun 2017 berjumlah Rp. 2.735.000.000,00 untuk OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan realisasi keuangan sebesar 89,53% atau Rp. 2.448.736.483,00 dan realisasi fisik sebesar 100%.

Didalam melaksanakan 2 (dua) program pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik ini, OPD Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu kepada pemenuhan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD pada misi ke - 3 (tiga) yaitu, persentase penyelesaian permasalahan keagamaan. Pada tahun 2016 target penyelesaian konflik adalah 100%, yang berarti semua konflik yang terjadi pada tahun 2017, dapat diselesaikan dengan baik. Untuk mencapai target tersebut, dilaksanakan beberapa kegiatan dan program, diantaranya program pengembangan wawasan kebangsaan, program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dan seterusnya.

## BAB V

### PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

#### 5.1. KERJASAMA ANTAR DAERAH

##### 5.1.1. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN

Kebijakan yang dilaksanakan pada kerjasama antar daerah adalah melalui program Peningkatan Kerjasama Daerah dengan kegiatan Fasilitasi dan Peningkatan Kerjasama Antara Daerah, Pertemuan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), pertemuan Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI). Keikutsertaan pemerintah Kota Jambi dalam ICLEI (*International Council for Local Environmental Initiatives*), UCLG (*United Cities and Local Government*) dan kerjasama dengan pihak ketiga.

##### **Fasilitasi dan Peningkatan Kerjasama Antar Daerah**

Adapun kegiatan Fasilitasi dan Peningkatan Kerjasama Antar Daerah pada tahun 2017 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 500.000.000,00 dimana realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan sebesar 91,23% atau Rp. 456.173.667,00, yang didalamnya terdapat Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) Kota Jambi, dan Tim Teknis TKKSD.

TKKSD yang merupakan tim koordinasi penyelenggaraan kerjasama daerah, dimana setiap kerjasama harus melalui kajian Tim TKKSD untuk mendapatkan kerjasama yang saling menguntungkan, Tim Teknis TKKSD untuk memfasilitasi dan menyiapkan bahan-bahan yang akan di bahas dalam rapat Tim TKKSD.

##### 5.1.2. KEGIATAN PERTEMUAN APEKSI

SKPD yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan ini adalah Bagian Kerjasama Setda Kota Jambi, untuk biaya kontribusi kegiatan/iuran APEKSI ada pada kegiatan Fasilitasi dan peningkatan kerjasama antar daerah dengan Pagu Anggaran Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan realisasi keuangan Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Adapun kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah se-Indonesia. Tahun 2017, kegiatan Rakernas (APEKSI) ke XII Tahun 2017 dilaksanakan di Kota Malang pada tanggal 18 sampai dengan 20 Juli 2017.

Program peningkatan kerjasama APEKSI ini masih terbatas pada pertemuan-pertemuan Rakernas Anggota APEKSI se-Indonesia dan pertemuan Catur wulan Anggota

APEKSI Komwil II se-Sumbagsel, dimana pada pertemuan tersebut dibahas tentang Peraturan-peraturan Pemerintah yang dipandang masih kurang mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pada pertemuan Rakernas APEKSI tanggal ke XII Tahun 2017 di Kota Malang pada tanggal 18 sampai dengan 20 Juli 2017 tema yang diangkat adalah “Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah untuk Mendukung Pembangunan Nasional”. Dari pertemuannya itu dibuatkan rekomendasi dan usulan yang konstruktif.

### 5.1.3. KEGIATAN PERTEMUAN AKKOPSI

Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Jambi juga masih menjadi anggota Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI), yang merupakan aliansi kabupaten/kota untuk mendorong terwujudnya Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi sanitasi di Indonesia, dalam rangka memenuhi target universal access sanitasi pada akhir tahun 2019.

## 5.2. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Kerjasama Pemerintah Daerah Kota Jambi dengan Pihak Ketiga dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi dalam bentuk penerbitan perizinan, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Jambi.

Berdasarkan Keputusan Walikota Jambi Nomor 41 Tahun 2014 tanggal 3 Oktober 2014, Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada DPMPTSP yang berwenang untuk mengeluarkan 41 jenis izin dan penambahan 1 izin lagi menurut Peraturan Walikota Jambi Nomor 18 Tahun 2014 tentang Cara Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, sehingga total jenis pelayanan perizinan yang ada di Kota Jambi berjumlah 42 buah. Pada tahun 2017, Izin prinsip yang dikeluarkan berjumlah 5 (lima) buah dengan nilai investasi sebesar Rp. 545.511.000.000,00 sebagaimana tergambar pada tabel 5.1 berikut:

**Tabel 5.1**  
**Daftar Izin Prinsip Yang Terbit Tahun 2017**

No.	Nama Perusahaan	Nama Usaha	Tanggal izin	Rencana Investasi (Rp.)
1.	Yudi Limardi (Perorangan)	Supermarket	23 Me 2017	3.011.000.000
2.	PT. Mekar Dharma Medika	Rumah Sakit Mitra	05 Juni 2017	41.600.000.000
3.	Yayasan Bunda Nusantara	Rumah Sakit Rimbo Medika	03 Juli 2017	3.000.000.000
4.	PT. Indomarco Prismatama	Minimarket	07 Juli 2017	43.900.000.000
5.	PT. Rajo Transmitra Sentosa	Transmart	25 Agustus 2017	454.000.000.000
	Jumlah			545.511.000.000

Untuk tahun 2017 terdapat 5 (lima) buah *Memorandum Of Undersranding/Nota Kesepahaman* dan 23 (dua puluh tiga) buah *Perjanjian Kerja Sama* yang ditanda tangani oleh Pemerintah Kota Jambi dengan pihak ketiga.

**Tabel 5.2.**  
**Memorandum Of Undersranding dan Perjanjian Kerja Sama yang ditanda tangani oleh Pemerintah Kota Jambi dengan pihak ketiga Tahun 2017**

NO	TANGGAL MoU/PKS	NAMA MoU / PKS	MASA KERJASAMA	PARA PIHAK
1	2	3	4	5
1	30 Januari 2017	Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Jambi dengan PT. Devis Jaya tentang Kerjasama Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)	10 (sepuluh) tahun	1. Ir. H. Daru Pratomo (Sekda Kota Jambi) 2. Novis Anthony Geowito (Dirut PT. Devis Jaya)
2	10 Februari 2017	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Jambi dengan Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Lembaga Administrasi Negara tentang Pelaksanaan Assessment Seleksi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi	1 (satu) Tahun	1. Ir. H. Daru Pratomo (Sekda Kota Jambi) 2. Hari Nugraha, SE. MPM (Kepala Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Lembaga Administrasi Negara)
3	22 Mei 2017	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Jambi dengan Kejaksaan Negeri Jambi tentang Koordinasi dan Kerjasama Dalam Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	2 (dua) Tahun	1. H. Syarif Fasha, ME (Walikota Jambi) 2. Imam Wijaya, SH. MH (Kepala Kejaksaan Negeri Jambi)
4	22 Mei 2017	Perjanjian Kerja Sama Antara Diskominfo Kota Bandung dengan Diskominfo Kota Jambi tentang Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Smart City Kota Bandung di Kota Jambi	3 (tiga) Tahun	1. dr.Ahyani Raksanagara, M.Kes (Kepala Diskominfo Kota Bandung) 2. Drs. Nirwan, ME (Kepala Diskominfo Kota Jambi)
5	5 Juli 2017	MoU Antara Pemerintah Kota Jambi dengan Universitas Jambi tentang Kerjasama Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Bimbingan Teknis, Perencanaan, Standarisasi, Iptek, dan Informasi, Analisis,	2 (dua) Tahun	1. H. Syarif Fasha, ME (Walikota Jambi) 2. Prof. H. Johni Najwan, SH. MH. Ph.D (Rektor Universitas Jambi)

1	2	3	4	5
6	4 Agustus 2017	Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kota Jambi dengan Kepolisian Daerah Jambi tentang Green Jambi Safety Driving Centre	1 (satu) Tahun	1. H. Syarif Fasha, ME (Walikota Jambi) 2. Brigjen Pol. Drs. Priyo Widyanto, MM (Kepala Kepolisian Daerah Jambi)
7	4 Sept 2017	Nota Kesepahaman Antara Walikota Jambi dengan Rektor IPDDN tentang Kerjasama Dalam Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur, Penelitian dan Pengkajian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat	2 (dua) Tahun	1. H. Syarif Fasha, ME (Walikota Jambi) 2. Prof. Dr. H. Ermaya Suradinata, SH. MH. MS (Rektor IPDN)
8	7 Sept 2017	Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU & PR dengan Pemerintah Kota Jambi tentang Pelaksanaan Program Penurunan Emisi Kota-Kota Dalam Rangka Pengelolaan Sampah di Kota Jambi	5 (lima) Tahun	1. Dodi Krispratmadi (Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU & PR) 2. H. Syarif Fasha, ME (Walikota Jambi)
9	14 Sept 2017	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Jambi dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan tentang Kerjasama Pembangunan Daerah	5 (lima) Tahun	1. H. Syarif Fasha, ME (Walikota Jambi) 2. Airin Rachmi Diany Walikota Tangerang Selatan)
10	18 Sept 2017	Nota Kesepahaman Antara Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian LHK dengan Walikota Jambi tentang Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Kota Jambi	2 (dua) Tahun	1. Drs. MR Karliansyah, MS (Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian LHK) 2. H. Syarif Fasha, ME (Walikota Jambi)
11	19 Sept 2017	Perjanjian Kerjasama antara direktur pengolaan sampah kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dengan kepala dinas lingkungan hidup kota jambi . tentang program pemberdayaan dalam pengelolaan sampah berkelanjutan di Kota Jambi	2 Tahun	1. Ir. Sudirman, MM (Direktur Pengelolaan sampah, limbah dan B3 Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan) 2. DR. Ardi, SP.Msi
12	8 Nov 2017	Perjanjian Kerja Sama Antara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dengan Pemerintah Kota Jambi tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Data dan Teknologi Penginderaan Jauh Guna Mendukung Pembangunan Kota Jambi	3 (tiga) Tahun	1. Dr. Orbita Roswintarti, M.Sc (Deputi Bidang Penginderaan Jauh, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) 2. H. Syarif Fasha, ME (Walikota Jambi)
13	20 Nov 2017	Kesepakatan Bersama Antara Pemerinah Kota Jambi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Jambi tentang Pelayanan Tera, Tera Ulang, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal	1 (satu) Tahun	1. H. Zumi Zola Zulkifli, S.TP, M.A 2. H. Syarif Fasha, ME (Walikota Jambi) 3. Hj. Maznah Busro (Bupati Muaro Jambi) 4. H. Sahirsyah (Bupati Batanghari) 5. H. Syafrial (Bupati Tanjab Barat) 6. H. Romi Hariyanto (Bupati Tanjab Timur) 7. H. Sukandar (Bupati Tebo) 8. H. Mashuri (Bupati Bungo) 9. H. Cek Endra (Bupati Sarolangun) 10. H. Al Haris (Bupati Merangin) 11. H. Adi Rozal (Bupati Kerinci) 12. H. Asafri Jaya Bakri (Walikota Sungai Penuh)
14	20 Nov 2017	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi tentang Pelayanan Tera, Tera Ulang, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal	13 (tiga belas) bulan 10 (sepuluh) hari	1. Komari, SH. MH (Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi) 2. Nur Subiyantoro, SE (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi)



1	2	3	4	5
15	20 Nov 2017	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Pelayanan Tera, Tera Ulang, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal	13 (tiga belas) bulan 10 (sepuluh) hari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komari, SH. MH (Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi)</li> <li>2. Syafrivan, SE (Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat)</li> </ol>
16	20 Nov 2017	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pelayanan Tera, Tera Ulang, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal	13 (tiga belas) bulan 10 (sepuluh) hari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komari, SH. MH (Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi)</li> <li>2. Drs. Hero Suratman (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur)</li> </ol>
17	20 Nov 2017	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo tentang Pelayanan Tera, Tera Ulang, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal	13 (tiga belas) bulan 10 (sepuluh) hari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komari, SH. MH (Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi)</li> <li>2. H. Deddy Irawan, SE. MM (Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo)</li> </ol>
18	20 Nov 2017	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dengan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun tentang Pelayanan Tera, Tera Ulang, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal	13 (tiga belas) bulan 10 (sepuluh) hari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komari, SH. MH (Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi)</li> <li>2. Drs. Kholidi (Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun)</li> </ol>
19	20 Nov 2017	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan KOTA Sungai Penuh tentang Pelayanan Tera, Tera Ulang, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal	13 (tiga belas) bulan 10 (sepuluh) hari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komari, SH. MH (Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi)</li> <li>2. Harianto, S. Sos (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan KOTA Sungai Penuh)</li> </ol>
20	20 Nov 2017	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci tentang Pelayanan Tera, Tera Ulang, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal	13 (tiga belas) bulan 10 (sepuluh) hari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komari, SH. MH (Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi)</li> <li>2. Drs. Rahminuddin (Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci)</li> </ol>
21	20 Nov 2017	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dengan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batanghari tentang Pelayanan Tera, Tera Ulang, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal	13 (tiga belas) bulan 10 (sepuluh) hari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komari, SH. MH (Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi)</li> <li>2. Drs. H. Syafe'i, MM (Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batanghari)</li> </ol>
22	20 Nov 2017	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tebo tentang Pelayanan Tera, Tera Ulang, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal	13 (tiga belas) bulan 10 (sepuluh) hari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komari, SH. MH (Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi)</li> <li>2. Drs. Zulkarnain (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tebo)</li> </ol>
23	22 Nov 2017	Nota Kesepahaman Antara Kementerian Kesehatan RI dengan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang Penempatan Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untung Suseno Sutarjo (Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI)</li> <li>2. Dr. H. Syarif Fasha, SE. ME (Walikota Jambi)</li> </ol>

Selain kerjasama dengan Asosiasi di Indonesia, Pemerintah Kota Jambi pada tahun 2017 tetap menjadi anggota *Internasional Council for Local Environmental Initiatives*

(ICLEI), *United Cities Local Government Asia Pacific* (UCLG ASPAC), dan baru bergabung dengan *Democratic Local Governance in Southeast Asia* (DELGOSEA) serta kerjasama dengan institusi internasional. Adapun kegiatan yang diikuti dalam keanggotaan tersebut, diantaranya:

1. Pada tanggal 15 sampai dengan 18 Februari 2017 menghadiri undangan KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG (KAS) dalam jaringan kerjasama '*Partnerships for Democratic Local Governance in Southeast Asia* (DELGOSEA)' yang bermitra dengan *the United Cities and Local Governments Asia Pacific* (UCLG-ASPAC) dimana Kota Jambi menjadi salah satu anggotanya menghadiri "*landmark conference* dengan tema "*50 Years of ASEAN: paving the way for Local Dynamics in a Regional Context*" (Peringatan 50 tahun berdirinya ASEAN: Mempersiapkan Jalan Untuk Dinamika Lokal Dalam Konteks Regional). Kota Jambi sekaligus menjadi panelis dalam acara tersebut Bapak Sekretaris Daerah Kota Jambi selaku perwakilan dari Kota Jambi menyampaikan keunggulan-keunggulan dan daya tarik Kota Jambi, terutama kondisi yang kondusif bagi investasi dan sumber daya alam disekitar Kota Jambi sebagai sentral pengembangan, selanjutnya dalam diskusi, berkembang pertanyaan dari peserta tentang smart city Kota Jambi, peran perempuan dalam bidang ekonomi di Kota Jambi dan lain-lain.
2. Pemerintah Kota Jambi juga berkerjasama dengan pemerintah Singapore melalui konsulat jendral Singapore di Medan dan Kementerian Dalam Negeri mengenai training peningkatan kapasitas ASN di Kota Jambi. Pada tahun 2017, pemerintah kota Jambi mengirim empat proposal *customized training* melalui *Singapore Corporate Program* (SCP) dalam bidang pendidikan, kesehatan, *public service*, *city management training*. Pada tahun yang sama pemerintah Kota Jambi mendapatkan kesempatan mengirim tiga gelombang dengan total peserta 75 orang, dan satu gelombang pada awal tahun 2018. Selain *Customized training*, pemerintah Kota Jambi melalui bagian kerjasama Setda Kota Jambi memfasilitasi pengirim peserta reguler SCP, untuk *city management training* tanggal 26 Februari sampai dengan 3 Maret 2017, *public service training* tanggal 6 sampai dengan 10 Maret 2017, mengikuti *21st Century teacher Education training* pada bulan Mei 2017 dan *Public Governance and Administration training* pada bulan Desember 2017.
3. Pemerintah Kota Jambi sebagai anggota UCLG, mendapatkan kesempatan untuk mengikuti *Cultural and tourism training* di Jeju, Korea pada bulan Mei 2018.
4. Terkait dengan seleksi penghargaan *Internasional Observatory on Participatory Democracy* (IOPD) di Montreal, Canada, Pemerintah Kota Jambi menerima *recognition* atas inovasi Bangkit Berdaya yang merupakan salah satu bentuk pembangunan yang

- mengikutsertakan masyarakat, dengan diberikannya *Diploma Recognition* atas inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi pada Konferensi ke-17 Internasional Observatory on Participatory Democracy ( IOPD) di Montreal, Canada pada tanggal 17 sampai dengan 19 Juni 2017.
5. Komunikasi yang baik antara Pemerintah Kota Jambi dengan Konsulat Jendral Republik China juga telah terbina dengan baik, pada tanggal 10 sampai dengan 30 Oktober 2017, Pemerintah Kota Jambi mengirim 2 (dua) orang ASN untuk mengikuti training infrastruktur di Beijing, China.
  6. Pemerintah Kota Jambi juga menjalin kerjasama dengan UNESCAP melalui Kementerian Lingkungan Hidup RI terkait dengan Kerjasama *project Pro-Poor and Sustainable Solid Waste Management in Secondary Cities and Small Town*. Atas kerjasama ini, pemerintah Kota Jambi mendapatkan kesempatan menghadiri pelatihan dan seminar terkait dengan pengelolaan persampahan, diantaranya: Tanggal 29 November sampai dengan 2 Desember 2017 menghadiri workshop regional tentang pembangunan berkelanjutan : Manfaat Pengelolaan Limbah Padat Kota Terdesentralisasi untuk Wilayah Asia Pasifik, yang diselenggarakan sebagai kegiatan puncak dari *project pro poor and sustainable solid waste managment in secondary citties and small towns, di United Nations Conference Centre (UNCC) Bangkok*.
  7. Terkait dengan proyek *project Pro-Poor and Sustainable Solid Waste Management in Secondary Cities and Small Town*. Pemerintah kota Jambi mengirim empat orang ASN yang di training ke Dhaka, Bangladesh sebagai operator *Integrated Resource Recovery Center (IRRC)* pada tanggal 9 sampai dengan 13 Oktober 2018.
  8. Selain dengan UNESCAP, pemerintah Kota Jambi pada tahun 2017, menginisiasi kerjasama dengan *United Nations Centre for Regional Development (UNCRD)* dan diundang untuk menghadiri Dialog dan Workshop *Training Regional EST Policy* untuk Kota-Kota di Asia Selatan dan Asia Tenggara dengan tema: “Membangun kota-kota yang tangguh dan berkelanjutan melalui solusi dan langkah EST dalam rangka mewujudkan agenda 2030 untuk pembangunan yang berkelanjutan” di *Asian Institute of Technology (AIT)*, Fathum Thani, Thailand. Tujuan dari Workshop *Training Regional EST Policy*, adalah untuk memberi pemahaman bersama dari seluruh kota-kota di Asia mengenai elemen penting EST termasuk dibutuhkanannya pendekatan terpadu guna menangani praktik transportasi yang tidak berkelanjutan dan untuk membangun Kota-kota Asia yang tangguh, aman, berkelanjutan dan lebih layak huni.
  9. **ICLEI**, pada tanggal 6 sampai dengan 9 Desember 2017 Pemerintah Kota Jambi menghadiri *3<sup>rd</sup> Asia-Pacific on Urban Resilienece and Adaptation-Resilient Cities Asia*

*Pacific Congress 1017 di Ho Chi Minh City, Vietnam* serta menjadi pembicara pada sesi *A match-making session between City applicants to the Transformative Actions Platform and potential donors linking city actions with financing*, tanggal 7 Desember 2017.

### 5.3. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

Dalam rangka pelaksanaan wewenang, tugas dan kewajiban urusan pemerintahan umum pemerintah Kota Jambi menyelenggarakan koordinasi dengan Instansi Vertikal yang diarahkan untuk mensinergikan dan mengoptimalkan pelaksanaan pemerintahan di daerah. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan instansi vertikal antara lain :

No	Kegiatan	Tujuan
1	Melaksanakan pemantauan orang asing	Untuk mengetahui jumlah dan aktivitas orang asing
2	Penanganan konflik sosial	Untuk menjaga stabilitas keamanan daerah
3	Melaksanakan kegiatan sosialisasi pembinaan umat beragama dikota Jambi	Menjaga dan meningkatkan toleransi beragama
4	Melaksanakan sosialisasi pembauran kebangsaan	Meningkat rasa nasionalisme ASN dan masyarakat
5	Melaksanakan rapat koordinasi Forkompinda	Meningkatkan sinergitas pemyelenggaraan tugas pemerintahan umum
6	Melaksanakan pemantauan dan sosialisasi politik	- Untuk mengetahui perkembangan dan situasi politik (stabilitas politik) - Pendidikan politik bagi pemilih pemula
7	Melaksanakan bantuan keuangan parpol	Pembinaan terhadap sekretariat Parpol
8	Melaksanakan pemantauan terhadap Orkemas	Legalitas orkemas

### 5.4. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

Kota Jambi merupakan Ibu Kota dari Provinsi Jambi, hal ini diresmikan dengan dikeluarkannya UU No. 61 tahun 1958 pada tanggal 6 Januari 1957. Dengan luas wilayah ± 169,02 km<sup>2</sup>, Kota Jambi berada pada ketinggian rata-rata 10 sampai 60 meter di atas

permukaan laut. Secara geografis posisi Kota Jambi berada pada 01°30'2,98" - 01°40'1,07" Lintang Selatan dan 103°40'1,67" - 103°40'0,22" Bujur Timur. Dimana seluruh wilayah Kota Jambi dikelilingi oleh Kabupaten Muaro Jambi, dengan kata lain Kabupaten Muaro Jambi dapat diartikan sebagai kawasan interland dimana Kota Jambi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Seiring perjalanan waktu, luas Kota Jambi mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013 - 2033 kondisi eksisting luas Kota Jambi ± 17.553 ha. Akan tetapi saat ini masih terjadi perbedaan pandangan antara Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi terkait batas-batas wilayah pada beberapa titik koordinat. Hal ini masih terus dalam upaya mencari kesepakatan antara Pemerintah Kota Jambi dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang dimediasi oleh Pemerintah Pusat.

Disamping itu, dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kecamatan Alam Barajo, Kecamatan Danau Sipin dan Kecamatan Pall Merah jumlah Kecamatan di Kota Jambi saat ini terbagi menjadi 11 Kecamatan. Dimana sebelumnya berjumlah 8 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Telanaipura, Kecamatan Jambi Selatan, Kecamatan Jambi Timur, Kecamatan Kotabaru, Kecamatan Pasar, Kecamatan Jelutung, Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan Pelayangan.

## **5.5. PENANGANAN BENCANA**

Kota Jambi adalah merupakan bagian dari Pulau Sumatera dan termasuk dalam lingkup Propinsi Jambi, dibagian barat Propinsi Jambi terdapat pegunungan Bukit Barisan yang dibatasi oleh Gunung Kerinci dan bagian timurnya langsung berbatasan dengan Laut Cina Selatan.

Kota Jambi dibelah oleh Sungai Batanghari yang merupakan hilir dan selalu menerima kiriman air dari beberapa anak sungai di bagian hulunya sehingga rawan akan banjir, perubahan iklim juga sering berpengaruh langsung sebagai penyebab timbulnya bencana, oleh karena itu Kota Jambi dikategorikan masih termasuk dalam lingkaran ancaman bencana terutama yang disebabkan oleh alam, kerawanan Kota Jambi terhadap bencana dapat dilihat juga dari sering terjadinya bencana seperti banjir, kebakaran, tanah longsor, bencana angin puting beliung dan bencana kabut asap.

Pada tahun 2017 tingkat kejadian kebakaran menurun dari tahun sebelumnya yaitu dari 69 kejadian menjadi 56 kejadian. Dari 56 kejadian, penyebab kebakaran yang paling tinggi masih dipengaruhi oleh Korsleting Listrik sebanyak 31 kejadian, dengan jumlah kejadian terbesar berada di Kecamatan Telanaipura, seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.3.**  
**Kejadian Kebakaran Tahun 2017 Berdasarkan Kecamatan di Kota Jambi**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Kejadian</b>
1	Pasar	2 Kejadian
2	Jambi Timur	3 Kejadian
3	Telanaipura	11 Kejadian
4	Jambi Selatan	6 Kejadian
5	Kotabaru	9 Kejadian
6	Pelayangan	2 Kejadian
7	Danau Teluk	1 Kejadian
8	Jelutung	7 Kejadian
9	Alam Barajo	9 Kejadian
10	Danau Sipin	1 Kejadian
11	Paal Merah	3 Kejadian
12	Muaro Jambi	2 Kejadian
	<b>Jumlah</b>	<b>56 Kejadian</b>

*Sumber Data : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi*

Dalam kejadian kebakaran selama tahun 2017 menimbulkan korban jiwa sebanyak 2 (dua) orang, dan kerugian materi diperkirakan sebesar Rp. 2.711.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus sebelas juta rupiah).

Penanggulangan Bencana yang terjadi di Kota Jambi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Jambi dan masyarakat secara umum, di Kota Jambi telah dibentuk Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana yang anggotanya terdiri dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Kesehatan Kota Jambi serta Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) lainnya yang terkait dan berbagai unsur masyarakat

Dalam menghadapi bencana, Tim Penanggulangan Bencana Kota Jambi selalu berkoordinasi dengan Tim Penanggulangan Bencana Propinsi, hal ini bermanfaat karena jika pada saat terjadi bencana Tim Penanggulangan Bencana Kota Jambi bisa mendapatkan bantuan dengan cepat utamanya untuk penanggulangan tanggap darurat

Adapun kegiatan lain yang dilaksanakan dalam rangka persiapan penanggulangan bencana di Kota Jambi adalah :

1. Telah disiapkan satu regu Tim SAR dari Personil Kodim 0415 Batanghari Khusus untuk penanganan banjir Aliran Sungai Batanghari ini dan bila terjadi keadaan memaksa maka dapat diturunkan Tim dari Pol Airud.
2. Telah disiapkan Tim Siaga Satuan Penanggulangan Bencana yang posko utamanya berada di Dinas Kesbang & Polinmas Kota Jambi, anggotanya terdiri dari lintas sektoral Instansi dalam Kota Jambi termasuk dari TNI dan Polri.
3. Telah disiapkan Tim Pemantau Daerah Rawan Bencana khususnya Banjir untuk melihat situasi dan Kondisi dinamika ketinggian air terutama pada saat musim hujan.
4. Melaksanakan Tindakan Pemadaman kebakaran sesuai dengan data bencana kebakaran dengan menggunakan peralatan yang tersedia, dan juga memberikan bantuan peduli bencana bagi masyarakat yang terkena bencana khususnya kebakaran.

## **5.6. PENYELENGGARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN**

### **5.6.1 GANGGUAN YANG TERJADI**

Selama tahun 2017, secara umum kondisi ketentraman dan ketertiban umum di Kota Jambi cukup baik. Hanya diakhir tahun 2017 dilakukan relokasi pedagang agen grosir Pasar Angso duo ke Pasar Induk Grosir Talang Gulo Paal X. Dengan adanya relokasi ini, diharapkan Pasar Angso Duo dapat beroperasi selayaknya, yaitu pada pagi hari. Walaupun ada sedikit konflik terjadi, tetapi dalam pelaksanaannya berlangsung kondusif dikarenakan kerjasama Tim Gabungan Relokasi.

Selanjutnya mengenai gangguan ketentraman dan ketertiban umum masih dalam skala kecil dan relatif terkendali seperti berupa pelaksanaan aksi-aksi demonstrasi/unjuk rasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak tertib, masih banyaknya pengemis dan pengamen jalanan yang berkeliaran di tempat-tempat umum, Pelanggaran Perda dan Keputusan Walikota, kenakalan remaja dan anak sekolah, penggunaan lahan parkir yang tidak tertib.

### **5.6.2 OPD YANG TERLIBAT DALAM PENANGANAN KETERTIBAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 148 ayat (1) menyatakan bahwa “untuk membantu Kepala daerah dalam menegakkan Peraturan

daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja”. Sedangkan Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di Kota Jambi dilaksanakan secara lintas sektoral artinya ditangani oleh beberapa SKPD, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan berkoordinasi dengan TNI serta Polri. Dalam pelaksanaan pengamanan keamanan dan ketertiban secara langsung dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial, sedangkan untuk kegiatan yang berbentuk pemantauan dan koordinasi seperti pembentukan komisi intelejen daerah, forum komunikasi antar umat beragama, badan koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

### 5.6.3 PENANGGULANGAN DAN KENDALA

Penanggulangan ketentraman dan ketertiban serta pendekatan yang dilakukan di Kota Jambi sesuai dengan jenis gangguannya, artinya jika terjadi demonstrasi atau kerusuhan di berbagai tempat di Kota Jambi, baik kantor pemerintah maupun di tempat-tempat lain, maka personil Satpol PP akan turun langsung ke lapangan untuk mengawasi pelaksanaan demonstrasi tersebut. Jika terjadi kekacauan atau anarkisme maka personil Satpol PP akan bertindak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Kendala lain yang juga menjadi perhatian pemerintah Kota Jambi, yaitu menyangkut Pedagang Kaki Lima. Pertumbuhan pedagang kaki lima di Kota Jambi sangat pesat, hal tersebut menunjukkan makin menggeliatnya roda perekonomian di Kota Jambi. Namun disatu sisi pertumbuhan pedagang kaki lima menyumbangkan kesembrawutan dan kemacetan, oleh karena itu pemerintah Kota Jambi telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki lima yaitu Perda PKL No.5 Tahun 2006 dan PW No.6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaannya. Namun, dalam pelaksanaannya masih di jumpai pedagang-pedagang yang tidak mematuhi aturan, untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan razia-razia dan penertiban pedagang kaki lima termasuk area parkir di Kota Jambi. Adapun area yang telah dilakukan penataan PKL selama tahun 2017 antara lain:

a. Pasar Angso Duo dan sekitarnya,



- b. Pasar Talang Banjar dan sekitarnya,
- c. Pasar Keluarga, Tugu Juang dan sekitarnya
- d. Pasar Simpang Pulai dan sekitarnya
- e. Pasar Kebon Andil dan sekitarnya
- f. Pasar Simpang Bata dan sekitarnya
- g. Pasar Mayang sari dan sekitarnya
- h. Daerah-daerah sepanjang Jalan Protokol seperti: UNJA dan sekitarnya; IAIN dan sekitarnya; Sukorejo dan sekitarnya; Bandara dan sekitarnya;
- i. Daerah sepanjang Jalan Pattimura (STM, Mayang dan Nusa Indah)
- j. Daerah sepanjang jalan Kuburan Cina dan sekitarnya
- k. Daerah Perbatasan dengan Muara Jambi dan Terminal Alam Bara
- l. Daerah Paal V dan Jenderal Basuki Rahmat
- m. Pasar Jelutung dan sekitarnya

Satuan Polisi Pamong Praja juga mengadakan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah yang sudah diberlakukan di Kota Jambi, seperti izin mendirikan bangunan, izin undang-undang gangguan dan lain sebagainya.

Perkembangan pembangunan di Kota Jambi juga menimbulkan permasalahan sosial yaitu perkembangan anak jalanan, pengemis dan pekerja seks komersial yang pertumbuhannya cukup tinggi. Berkaitan dengan pekerja seks komersial Pemerintah Kota Jambi telah melakukan penutupan lokalisasi Payo Sigadung dan Langit Biru serta penghapusan praktek prostitusi sesuai dengan PERDA Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 dan terus melakukan razia, pengawasan, penyuluhan dan pembinaan dengan bekerja sama antar aparat keamanan (Poltabes), Dinas Sosial dan Unsur pemerintah lainnya.

#### 5.6.4. KEIKUTSERTAAN APARAT KEAMANAN DAN PENANGGULANGAN

Selama tahun 2017 pelaksanaan razia dan pembinaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pramong Praja di berbagai wilayah dalam Kota Jambi dilaksanakan dengan berkoordinasi dan melibatkan unsur-unsur lain dalam pemerintahan termasuk aparat keamanan (POLRI dan TNI-AD). Tim Penertiban Pelanggaran Perda terdiri dari berbagai unsur Pemerintah termasuk aparat keamanan.

## BAB VI PENUTUP

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dijabarkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini merupakan hasil koordinasi, kerjasama dan partisipasi semua stakeholders pembangunan mulai dari pemerintah daerah, DPRD, para pegiat perekonomian dan masyarakat luas sesuai dengan bidang, fungsi dan tugas masing-masing; yang didukung oleh APBD dan sumber pendanaan lainnya yang sah. Hasil-hasil pencapaian kinerja program yang dilaksanakan pada tahun 2017 merupakan realisasi dari seluruh aktivitas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran Pemerintah Kota Jambi bersama DPRD berdasarkan rencana kerja pembangunan selama kurun waktu satu tahun anggaran. Percepatan pembangunan infrastruktur untuk memacu perkembangan sektor ekonomi dalam rangka Kesejahteraan Rakyat dan Daya Saing Daerah dengan mengandalkan sektor perdagangan dan jasa sebagai lokomotif pertumbuhan. Berdasarkan data sementara Badan Pusat Statistik, Pertumbuhan ekonomi Kota Jambi tahun 2016 sebesar 6,81 % merupakan pertumbuhan yang cukup tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi maupun Nasional. Sebagai kawasan perkotaan yang berkembang perekonomian Kota Jambi bertumpu pada komoditas sekunder, yang secara gradual juga bergeser kepada komoditas tersier. Kondisi capaian ini dapat dijadikan landasan dan arah pengembangan perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Pilih Pusako Batuah.

Pada tahun 2017 sudah banyak keberhasilan yang kita capai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, hal ini dibuktikan juga dengan cukup banyaknya pengakuan dan penghargaan berbagai pihak terhadap kemajuan dalam berbagai bidang yang dicapai oleh Kota Jambi. Walaupun kita harus akui juga di banyak hal masih terdapat kekurangan bahkan ketidakpuasan masyarakat. Permasalahan pembangunan yang kita hadapi kedepan semakin penuh tantangan yang sejalan dengan tuntutan dinamika pembangunan untuk menuju peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih baik lagi. Untuk itu patut kiranya kita perkuat komitmen pembangunan melalui pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang semakin partisipatif dan adaptif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh stakeholders pembangunan, segenap pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran OPD di lingkungan Pemerintah Kota Jambi termasuk jajaran pemerintahan kelurahan dan masyarakat Kota

Jambi secara keseluruhan, serta pihak swasta yang telah memberikan dukungan dan bekerja keras bahu membahu melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan tahun 2017.

Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2017 ini terdapat kekurangan maupun kekeliruan, baik yang mencakup substansi pemerintahan maupun redaksional laporan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan kinerja kita pada tahun-tahun mendatang. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala langkah dan upaya kita untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kota Jambi. *Amin ya robbal alamin.*

Terima kasih.

**Pjs. WALIKOTA JAMBI**

**IR. MUHAMMAD FAUZI**